

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Wisata Kuliner Payung Kota Batu

Kota Batu merupakan sebuah kota yang terkenal dengan potensi wisata baik wisata buatan dan wisata alamnya. Wisata Kuliner Payung merupakan salah satu wisata di Kota Batu yang menonjolkan keindahan alam dan makanan yang dimiliki Kota Batu. Wisata Kuliner Payung secara administrasi berada di Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu yang terletak pada posisi 112,29⁰ Bujur Timur, 7,52⁰ Lintang Selatan.

Wisata Kuliner Payung terletak di batas barat Kota Batu Jawa Timur, terkenal sebagai kawasan peristirahatan dan kuliner bagi para pengendara yang melewati jalur antar kota Kediri dan Batu tersebut karena *view* dan suasana yang diberikan pada kawasan kuliner tersebut. Lokasi wisata kuliner berada di sepanjang jalan kolektor primer antara Kota Batu – Pujon - Kediri. Warung – warung dibangun menempati sempadan jalan dan bangunannya ditegakkan menggunakan tiang penopang karena lokasi pembangunan warung berada di pinggir jurang.



Gambar 4. 1 Bentuk Bangunan Wisata Kuliner Payung di Atas Jurang

Wisata Kuliner Payung terdiri dari tiga segmen payung. Deretan payung satu terletak di lokasi paling bawah yang dekat dengan permukiman masyarakat Kelurahan Songgokerto, payung dua berada di tengah dan payung tiga berada di atas yang berbatasan langsung dengan kecamatan Pujon. Setiap pembagian segmen payung dipisahkan oleh jalan yang berbelok serta pada lokasi Payung 1 dan Payung 2 terdapat. Berikut merupakan data jumlah warung dan jumlah pedagang yang ada di Wisata Kuliner Payung.

Tabel 4. 1
Data Jumlah Warung dan Pedagang di Wisata Kuliner Payung

No.	Lokasi Wisata Kuliner Payung	Jumlah Warung	Jumlah Pedagang
1.	Payung 1	35 Warung	61 Orang
2.	Payung 2	14 Warung	25 Orang
3.	Payung 3	15 Warung	28 Orang
Total		64 Warung	114 Orang

Berdasarkan **Tabel 4.1** dapat dilihat jumlah warung dan jumlah pedagang di Wisata Kuliner Payung. Jumlah pedagang yang ada di Wisata Kuliner Payung tidak sama dengan jumlah warung yang ada, hal tersebut disebabkan oleh adanya warung dengan jumlah pedagang lebih dari satu. Kebanyakan warung-warung yang ada di Wisata Kuliner Payung dimiliki oleh satu keluarga sehingga dari sebagian dari anggota keluarga tersebut menjadikan Wisata Kuliner Payung sebagai mata pencaharian mereka.



Gambar 4. 2 Deretan Warung di Segmen Payung 1

Segmen payung 1 memiliki jumlah warung terbanyak yaitu 35 warung dengan jumlah pedagang sebanyak 61 orang. Deretan warung-warung yang ada di lokasi Payung 1 dapat dilihat pada **Gambar 4.2**. Warung pertama dari segmen payung 1 berada paling dekat dengan permukiman masyarakat Kelurahan Songgokerto. Sedangkan warung terakhir yang masuk dalam segmen Payung 1 adalah warung yang terletak paling dekat belokan menuju segmen Payung 2. Di lokasi segmen payung 1 terdapat fasilitas umum berupa musholla dan pos keamanan, selain itu di segmen payung bangunan yang didesain mirip dengan payung dan berfungsi sebagai *landmark* Wisata Kuliner Payung. Kondisi *landmark* Wisata Kuliner Payung yang ada di segmen Payung 1 secara fisik sudah mengalami kerusakan sedangkan secara pemanfaatannya tidak ada pengunjung yang tertarik untuk menggunakan *landmark* tersebut sebagai objek foto.



Gambar 4. 3 Landmark Wisata Kuliner Payung di Segmen Payung 1

Segmen Payung 2 terletak setelah segmen payung 1, warung pertama yang ada di segmen Payung 2 terletak setelah belokan yang memisahkan dengan segmen Payung 1. Jumlah warung yang berada di segmen payung 1 sebanyak 14 warung dengan jumlah pedagang sebanyak 25 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah warung pada segmen payung 1 dan segmen payung 2 maka jumlah tersebut adalah jumlah paling sedikit. Hal ini disebabkan letak segmen payung 2 berada pada satu belokan yang dapat dilihat pada **Gambar 4.7**. Meskipun, memiliki jumlah yang paling sedikit warung-warung di segmen payung 2 memiliki kelebihan yaitu *view* yang lebih menarik karena berada tepat di tengah jalur yang digunakan sebagai lokasi warung sehingga pengunjung dapat lebih jelas menikmati pemandangan Kota Batu. Kondisi warung-warung yang berada di segmen payung 2 dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.



Gambar 4. 4 Deretan Warung di Segmen Payung 2

Seperti pada segmen payung 1, segmen payung 2 juga memiliki bangunan yang dijadikan *landmark* Wisata Kuliner Payung. Kondisi landmark yang ada di segmen payung 2 lebih terawat jika dibandingkan dengan landmark yang ada di segmen payung 1, hanya saja atap dan cat dari *landmark* tersebut sudah mengalami kerusakan. Jika dilihat dari segi

pemanfaatan *landmark* yang ada di segmen payung 2 sering dimanfaatkan oleh pengunjung, pedagang dan tukang parkir sebagai tempat duduk dan digunakan juga sebagai objek foto.

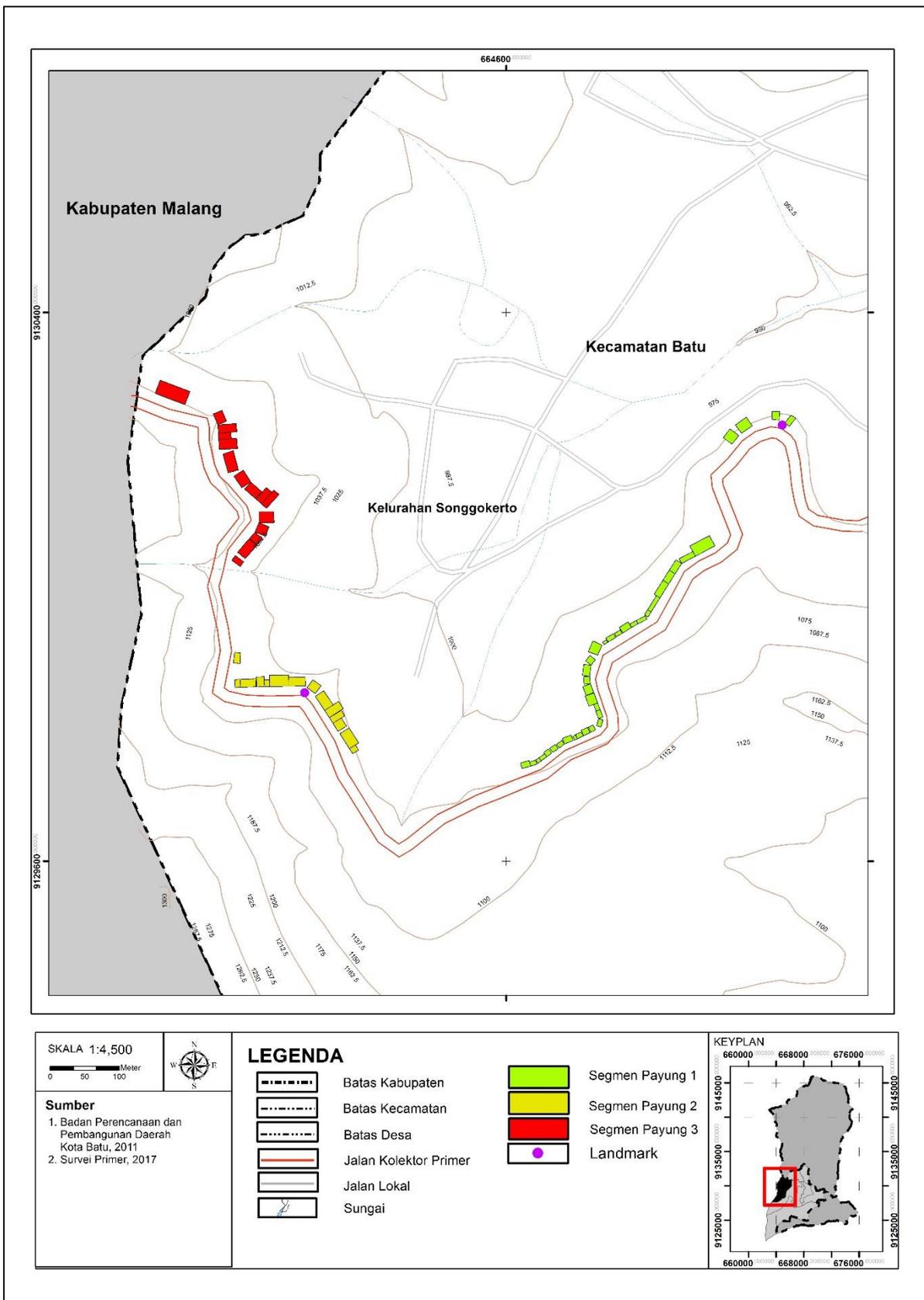


Gambar 4. 5 Landmark Wisata Kuliner Payung di Segmen Payung 2

Segmen Payung 3 adalah segmen yang memiliki jumlah warung sebanyak 15 warung dengan jumlah pedagang sebanyak 28 orang. Lokasi segmen Payung 3 berada di bagian paling atas yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sedangkan batas segmen payung 3 dengan segmen payung 2 adalah sungai yang berada dekat dengan warung pertama di segmen payung 3. Berbeda dengan warung di segmen payung 1 dan segmen payung 2 yang letak antar warungnya saling berhimpitan dan terdapat bangunan warung disepanjang belokan, warung-warung di segmen payung 3 memiliki jarak antar warung untuk pembangunannya. Hal tersebut disebabkan letaknya berada di belokan yang berbahaya jika digunakan sebagai lokasi pembangunan warung.



Gambar 4. 6 Deretan Warung di Segmen Payung 3



Gambar 4. 7 Persebaran Lokasi Wisata Kuliner Payung

4.2.1 Fasilitas Umum di Lokasi Wisata Kuliner Payung

Fasilitas umum yang terdapat di Wisata Kuliner Payung terdiri dari lahan parkir pada masing-masing warung dan musholla. Fasilitas umum yang ada di lokasi Wisata Kuliner Payung belum mampu melayani seluruh wisatawan karena jenis dan jumlahnya yang tidak memenuhi kebutuhan dari wisatawan dan pedagang. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing fasilitas umum yang ada di lokasi Wisata Kuliner Payung.

1. Musholla

Musholla di Wisata Kuliner Payung berjumlah satu unit yang terletak di payung bagian 1 atau payung paling bawah. Keberadaan musholla tersebut digunakan oleh pedagang dan wisatawan untuk beribadah. Namun jumlah dan lokasi musholla tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pedagang dan wisatawan yang ada di Wisata Kuliner Payung. Hal ini disebabkan letak lokasi payung 1, payung 2 dan payung 3 tidak berdekatan sehingga pedagang dan wisatawan yang berada di payung 2 dan payung 3 harus menggunakan kendaraan untuk mencapai musholla tersebut. Tetapi, meskipun jaraknya jauh dari payung 2 dan payung 3 bangunan musholla tersebut dengan kondisi baik dan terawat sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pedagang dan wisatawan



Gambar 4. 8 Musholla di Wisata Kuliner Payung

2. Lahan Parkir

Lahan parkir yang ada di Wisata Kuliner Payung tidak dikelola dengan menggunakan satu lahan bersama, namun menggunakan lahan dari masing-masing warung, sehingga setiap warung harus menyediakan lahan parkir tersendiri untuk kendaraan konsumen. Luas dari lahan parkir masing-masing berbeda-beda sesuai dengan sisa lahan yang tidak digunakan untuk warung. Kondisi dan perkerasan dari setiap lahan parkir juga berbeda, namun sebagian besar lahan parkir di Wisata Kuliner Payung dalam kondisi yang baik dengan perkerasan berupa plaster dan paving.



Gambar 4. 9 Lahan Parkir Wisata Kuliner Payung

3. Toilet Umum

Pada lokasi Wisata Kuliner Payung tidak tersedia bangunan yang dipergunakan sebagai toilet umum. Tetapi dari masing-masing pedagang yang memiliki warung di Wisata Kuliner Payung memberikan fasilitas berupa toilet sehingga wisatawan tetap terlayani fasilitas toilet.

4. Pos Keamanan

Pos keamanan di Wisata Kuliner Payung berjumlah satu unit yang berada di payung 1 atau payung paling bawah. Letak pos keamanan berada diantara bangunan-bangunan warung sehingga mampu melayani payung 1. Tetapi karena jarak lokasi pos keamanan yang jauh dengan payung 2 dan payung 3 maka kedua bagian payung tersebut belum mampu terlayani oleh pos keamanan. Bangunan pos keamanan tersebut dengan kondisi yang baik namun kurang terawat karena fungsi dari pos keamanan tersebut tidak berjalan dengan baik.



Gambar 4. 10 Pos Keamanan di Wisata Kuliner Payung

4.2.2 Kondisi Kawasan Hutan Lokasi Wisata Kuliner Payung Kota Batu

Wisata Kuliner Payung terletak pada kawasan hutan yang masuk kedalam batas wilayah Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pujon. Bagian Hutan Ngantang-Pujon memiliki luas wilayah yaitu 24.814,1 hektar yang secara administratif berada Daerah

Tingkat II Kabupaten Malang. Topografi lapangan wilayah hutan Ngantang-Pujon secara umum landai, curam dan sangat curam. BKPH Pujon terdiri dari lima Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yaitu RPH Pujon selatan, RPH Kedungrejo, RPH Pujon Utara, RPH Oro-Oro Ombo dan RPH Punten.

Berdasarkan Data fisik BKPH Pujon tahun 2014 Lokasi Wisata Kuliner Payung termasuk dalam bagian RPH Pujon Selatan yang memiliki luas hutan baku yaitu 2.950 hektar, luas hutan produksi 950 hektar dan luas hutan lindung yaitu 2000 hektar. Kemudian untuk wilayah yang digunakan sebagai lokasi Wisata Kuliner masuk dalam pembagian wilayah dengan klasifikasi lahan dengan tujuan istimewa yaitu digunakan sebagai lokasi berdagang atau lokasi Wisata Kuliner Payung yaitu seluas 2,5 hektar. Namun, tidak keseluruhan lahan dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan warung karena terdapat tebing dan lokasi-lokasi rawan bencana longsor.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010 – 2030 diketahui bahwa hutan yang digunakan sebagai Wisata Kuliner Payung termasuk dalam kategori kawasan hutan peyangga yang memiliki peran sangat penting bagi kelestarian alam. Fungsi dari hutan penyangga di RPH Punten adalah sebagai pendukung kepentingan konservasi dan kepentingan pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan Songgokerto.

4.2 Kondisi Pedagang Wisata Kuliner Payung

Proses pemilihan alternatif kebijakan yang tepat pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial dan kelembagaan pedagang di lokasi tersebut. Sehingga dalam menentukan alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung harus memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan kelembagaan pedagang di Wisata Kuliner Payung.

4.2.1 Kondisi Ekonomi

Wisata Kuliner Payung saat ini menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat dari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dan masyarakat Kelurahan Songgokerto, Kota Batu. Berdasarkan data hasil survei menunjukkan bahwa banyak pedagang yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka dari hasil berdagang di Wisata Kuliner Payung. Pedagang di Wisata Kuliner Payung sebagian besar menjadikan profesi berdagang sebagai pekerjaan utama. Berdasarkan **Tabel 4.2** dapat dilihat jumlah pedagang yang bekerja di sektor perdagangan saja dan pedagang yang memiliki pekerjaan selain berdagang.

Tabel 4. 2
Jenis Pekerjaan Pemilik Warung Wisata Kuliner Payung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Pedagang	54
2.	Peternak	23
3.	Petani	17
4.	Tukang parkir	6
5.	Penyedia jasa pariwisata	14
Total		114



Gambar 4. 11 Diagram Prosentase Jenis Pekerjaan Pemilik Warung Wisata Kuliner Payung

Berdasarkan hasil prosentase jenis pekerjaan pemilik warung Wisata Kuliner Payung dapat dilihat bahwa terdapat 54 orang atau sebanyak 48% dari total pemilik warung yang penghasilannya hanya bergantung dari hasil berjualan di Wisata Kuliner Payung. Sedangkan pemilik warung yang lain memiliki pekerjaan lain yang terdiri dari 23 orang atau sebanyak 20% pemilik warung yang bekerja sebagai peternak, 17 orang atau sebanyak 15% dari pemilik warung bekerja sebagai petani, 6 orang atau sebanyak 5% pemilik warung yang bekerja sebagai tukang parkir dan sebanyak 14 orang atau 12% pemilik warung yang terlibat sebagai penyedia jasa pariwisata di Kabupaten Malang. Sebanyak 48% pedagang yang mengandalkan penghasilan dari hasil Wisata Kuliner Payung, sehingga alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung harus memperhatikan aspek ekonomi dari pedagang di Wisata Kuliner Payung.

Keberadaan Wisata Kuliner Payung membuka kesempatan pekerjaan baru bagi masyarakat Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung diperoleh data bahwa saat ini pendapatan para pedagang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pengunjung sehingga pendapatan

yang setiap bulannya bisa mencapai Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 saat ini menurun hingga Rp. 500.000 – Rp 750.000. Permasalahan menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang salah satunya disebabkan oleh menurunnya daya saing Wisata Kuliner Payung dengan wisata-wisata baru. Dampak dari penurunan jumlah pengunjung adalah berkurangnya dana pemasukan yang diperoleh oleh pedagang yang secara langsung berpengaruh terhadap keterbatasan dana yang dimiliki pedagang untuk mengelola fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Wisata Kuliner Payung.

4.2.2 Kondisi Sosial

Kondisi sosial pedagang Wisata Kuliner Payung dilihat dari asal pedagang dan pengetahuan pedagang terkait dampak yang ditimbulkan dengan adanya Wisata Kuliner Payung. berikut penjelasan dari masing-masing kondisi sosial pedagang Wisata Kuliner Payung.

A. Data Asal Pedagang Wisata Kuliner Payung

Perkembangan Wisata Kuliner Payung diawali oleh masyarakat dari Kecamatan Pujon yang berprofesi sebagai peternak sapi perah dan petani. Para peternak tersebut mengembangkan usaha dengan menjual olahan dari susu sapi dan didukung oleh petani yang menjual jagung bakar di sepanjang jalur Kota Batu – Pujon – Kediri. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi pemandangan alam sehingga menjadi daya tarik untuk menarik minat pengunjung. Pada awalnya, pedagang hanya berjualan dipinggir jalan tanpa menggunakan kios tetapi pada tahun 1981 terdapat beberapa penjual yang sudah memiliki kios atau warung. Karena usaha yang diawali oleh peternak dan petani tersebut semakin sukses serta lokasi tersebut juga digunakan oleh pengguna jalan di jalur tersebut sebagai tempat untuk istirahat, maka banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut membangun kios atau warung-warung baru hingga saat ini sudah terdapat 64 warung yang terbangun di kawasan Wisata Kuliner Payung.

Asal pedagang saat ini tidak hanya dari Kecamatan Pujon saja tetapi juga berasal dari kawasan lain yang semakin mendukung berkembangnya Wisata Kuliner Payung. Berikut data terkait asal masing-masing pedagang Wisata Kuliner Payung.

Tabel 4. 3
Data Asal Pedagang Wisata Kuliner Payung

No.	Asal Pedagang	Jumlah (Jiwa)
1.	Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang	91
2.	Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu	6
3.	Luar Malang Raya	17
Total		114

Berdasarkan data hasil survei terkait asal pedagang Wisata Kuliner Payung menunjukkan bahwa pedagang yang berasal dari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang memiliki jumlah terbanyak yaitu 91 pedagang dan pedagang yang berasal dari Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu memiliki jumlah paling sedikit yaitu 6 pedagang, sedangkan 17 pedagang yang tersisa berasal dari luar wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Kediri.

Sedikitnya jumlah pedagang yang berasal dari Kelurahan Songgokerto menyebabkan munculnya beberapa konflik sosial. Selain disebabkan tidak ada proses perijinan yang dilakukan oleh pedagang kepada Pemerintah Kota Batu, terdapat alasan lain Pemerintah Kota Batu tidak memberikan anggaran dana kepada pedagang di Wisata Kuliner Payung, alasan tersebut adalah jumlah pedagang yang berasal dari Kota Batu hanya 6 pedagang dan lebih didominasi oleh pedagang dari luar Kota Batu. Pemerintah Kota Batu hanya memberikan bantuan berupa pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja kepada paguyuban pedagang yang melibatkan beberapa pedagang.

B. Pengetahuan pedagang terkait Kelestarian Lingkungan

Pengetahuan pedagang terkait kelestarian lingkungan dinilai melalui hasil survei kepada pemilik warung yaitu dengan mengajukan pertanyaan terkait pengetahuan pedagang terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan Wisata Kuliner Payung. Berikut data hasil survei tingkat pengetahuan pedagang terkait dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan Wisata Kuliner Payung.

Tabel 4. 4

Data Pengetahuan Pedagang Terhadap Dampak yang Ditimbulkan

No.	Pengetahuan pedagang Terhadap Dampak yang Ditimbulkan	Jumlah Pedagang (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Pedagang hanya mengetahui dampak positif	46	40
2.	Pedagang hanya mengetahui dampak negatif	36	32
3.	Pedagang mengetahui dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan	23	20
4.	Pedagang tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan	9	8
Total		114	100%

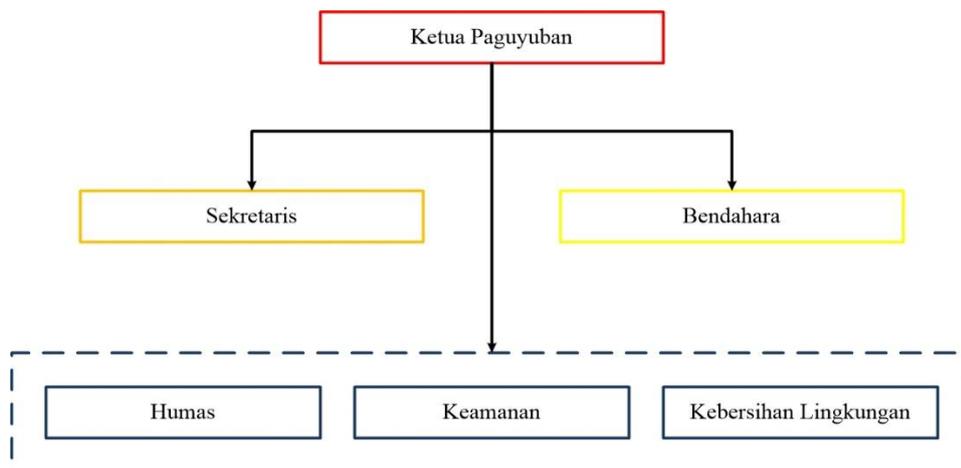
Melalui data hasil survei pengetahuan pedagang terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan Wisata Kuliner Payung dapat diketahui bahwa sebanyak 8% pedagang yang tidak mengetahui dampak dari adanya kegiatan Wisata Kuliner di lokasi hutan penyangga, sebanyak 20% pedagang mengetahui dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan Wisata Kuliner Payung terhadap kelestarian

lingkungan. Kemudian terdapat 32% pedagang yang hanya mengetahui dampak negatif dari adanya Wisata Kuliner Payung dilokasi hutan penyangga. Sedangkan sisanya, yaitu 40% pedagang hanya mengetahui dampak positif dari adanya kegiatan Wisata Kuliner Payung yaitu sebagai membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat tanpa mengetahui dampak negatif dari adanya Wisata Kuliner Payung.

Jumlah pedagang yang mengetahui dampak negatif dari adanya kegiatan Wisata Kuliner Payung termasuk dalam jumlah yang sedikit karena tidak mencapai setengah dari pedagang yang mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan. Hal tersebut menyebabkan pedagang lebih mengutamakan aspek ekonomi tanpa diimbangi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan Wisata Kuliner Payung.

4.2.3 Kondisi Kelembagaan

Terdapat satu kelembagaan yang dibentuk oleh pedagang di Wisata Kuliner Payung yaitu paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung. Paguyuban tersebut memiliki anggota berjumlah 17 orang pedagang di Wisata Kuliner Payung yang terdiri dari ketua paguyuban, sekretaris, bendahara dan anggota. Berikut merupakan struktur kelembagaan dari paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung.



Gambar 4. 12 Struktur Kelembagaan Wisata Kuliner Payung

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh paguyuban tersebut adalah pertemuan rutin atau rapat yang dilakukan satu bulan sekali. Tugas atau fungsi dari adanya paguyuban Wisata Kuliner Payung adalah sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab terhadap dana pemasukan dari pedagang dan mengelola dana tersebut untuk pengelolaan Wisata Kuliner Payung.
2. Melakukan interaksi langsung dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Malang.

3. Melakukan kerjasama dengan *supplier* barang yang dapat mendukung jual beli di Wisata Kuliner Payung.
4. Bertanggung jawab terkait proses perijinan sewa warung kepada pihak Perhutani KPH Malang.

Berdasarkan tugas dan fungsi paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung tersebut maka dapat diketahui bahwa fungsi kelembagaan sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Kelembagaan yang terbentuk dalam paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung menjalankan pertemuan rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Program yang sudah dijalankan oleh paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung adalah mengelola dana pemasukan dari pedagang untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh pedagang Wisata Kuliner Payung. Selain digunakan sebagai dana peningkatan fasilitas yang mendukung Wisata Kuliner Payung, tujuan utama pengumpulan dana dari para pedagang adalah untuk membayar biaya sewa kepada Perhutani KPH Malang yang dikelola oleh BKPH Pujon.

Program lain yang sudah dilakukan oleh paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung adalah melakukan kerjasama dengan pemasok barang yaitu dengan PT. Indofood Sukses Makmur. Namun, karena keterbatasan pemasukan dari masing-masing pedagang kerjasama tersebut tidak berjalan dengan lancar. Pemasok barang hanya memberikan *supply* barang ketika hari-hari besar seperti perayaan tahun baru.

Terdapat beberapa fungsi dan tugas dari paguyuban yang belum berjalan dengan baik. Tugas yang belum berjalan adalah proses perijinan pembangunan warung kepada Perum Perhutani KPH Malang dan Pemerintah Kota Batu belum selesai dilakukan, sehingga belum ada peraturan atau kebijakan yang mengatur pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Selain belum berjalannya seluruh fungsi dan tugas dari paguyuban pedagang Wisata kuliner Payung, terdapat juga permasalahan yang dihadapi oleh paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung. berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung.

1. Belum ada kesadaran dari pedagang terkait pentingnya daftar harga untuk menjaga kepuasan konsumen terhadap harga yang diberikan. Selain menjaga kepuasan konsumen, diharapkan dengan adanya daftar harga tidak ada pedagang yang menaikkan harga barang melebihi keuntungan normal ketika hari libur.
2. Wisata Kuliner Payung tidak memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi wisata-wisata alam yang baru.

3. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pedagang serta tidak ada bantuan dana dari Pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Malang sehingga paguyuban memiliki keterbatasan dalam pengembangan Wisata Kuliner Payung.

4.3 Analisis Konflik

Proses analisis konflik pengelolaan terkait pengelolaan Wisata Kuliner Payung dilakukan dengan menggunakan hasil survei primer kepada semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Berdasarkan hasil wawancara *stakeholder* yang dapat dilihat pada **Lampiran 10** maka dapat diketahui *stakeholder* yang terlibat pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang, Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto), paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Supplier barang, dan Pemerintah Kelurahan Songgokerto.

Tahap yang dilakukan pada analisis konflik adalah melakukan identifikasi *stakeholder* yang terlibat, mengidentifikasi fungsi dari masing-masing *stakeholder*, identifikasi konflik pengelolaan yang terjadi antar *stakeholder*, dan mengidentifikasi alternatif pengelolaan dari masing-masing *stakeholder*. Hasil identifikasi *stakeholder* yang terlibat pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung beserta fungsinya dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4. 5
Identifikasi Stakeholder dan Fungsi pada Pengelolaan Wisata kuliner Payung

No.	Identifikasi Kelompok	Jenis Kelompok Konflik	Fungsi
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	<i>Stakeholder</i> formal	Pembina pelaku Wisata Kuliner Payung
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	<i>Stakeholder</i> formal	Pengelolaan bencana di kawasan Wisata Kuliner Payung
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	<i>Stakeholder</i> formal	Pembuatan kebijakan atau peraturan terkait dengan pengelolaan Wisata Kuliner Payung
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	<i>Stakeholder</i> formal	Pemberi perijinan lingkungan hidup dan pengelolaan AMDAL
5.	Perum Perhutani KPH Malang	<i>Stakeholder</i> formal	Pengelola sumberdaya hutan di KPH Pujon dengan mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	<i>Stakeholder</i> non formal	Pembimbing, pembina dan pemberi wawasan kepada pedagang Wisata Kuliner Payung

No.	Identifikasi Kelompok	Jenis Kelompok Konflik	Fungsi
	Songgokerto (LPMK Songgokerto)		
7.	Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung	<i>Stakeholder</i> non formal	Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang berada pada lokasi Wisata Kuliner Payung, baik perijinan serta pengelolaan
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	<i>Stakeholder</i> formal	Penyelenggaraan Pelayanan administrasi di bidang perijinan pendirian bangunan di Wisata Kuliner Payung
9.	Pemerintah Kelurahan Songgokerto	<i>Stakeholder</i> formal	Pengawas dan membina paguyuban serta pedagang di Wisata Kuliner Payung
10.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	<i>Stakeholder</i> non formal	Kelompok pemasok barang makanan kepada pedagang-pedagang di Wisata Kuliner Payung

Pengelolaan Wisata Kuliner Payung melibatkan banyak *stakeholder* dengan fungsi yang berbeda-beda. Adanya fungsi yang berbeda-beda semakin memicu munculnya konflik pengelolaan. Berdasarkan hasil wawancara pada **Lampiran 2.** langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat konflik, mengidentifikasi konflik yang terjadi serta arahan alternatif dari masing-masing *stakeholder*. Konflik antar *stakeholder* di pengelolaan Wisata Kuliner Payung dapat dilihat pada **Tabel 4.6** yang berisi matriks konflik antar *stakeholder* pengelolaan Wisata Kuliner Payung dan arahan alternatif pengelolaan.

Tabel 4. 6
Matriks Konflik Antar Stakeholder Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

No.	Stakeholder	Stakeholder yang Terlibat Konflik	Konflik yang Terjadi	Arahan Alternatif Pengelolaan*
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> Perum Perhutani KPH Malang Paguyuban Pedagang Wisata Kuliner Payung 	<p>Konflik Kelembagaan Stakeholder (K1,I1)</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu mengarahkan dalam mengelola Wisata Kuliner Payung Perum Perhutani KPH Malang juga harus terlibat secara aktif, karena paguyuban pedagang sudah melakukan pembayaran sewa lahan secara rutin setiap bulan kepada Perum Perhutani KPH Malang (Ms1) sehingga seharusnya ada timbal balik yang dilakukan Perum Perhutani KPH Malang kepada pedagang Wisata Kuliner Payung. Sedangkan Perum Perhutani KPH Malang beranggapan bahwa tugas Perhutani hanya berkaitan dengan pengelolaan hutan yang digunakan sebagai lokasi wisata tanpa harus ikut campur pada pengembangan kegiatan wisata. (Ms1)</p>	<p>Pembuatan struktur kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung untuk mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama <i>stakeholder</i> (A1,I1)</p>

No.	Stakeholder	Stakeholder yang Terlibat Konflik	Konflik yang Terjadi	Arahan Alternatif Pengelolaan*
			Sehingga, dibutuhkan struktur kelembagaan yang jelas dari seluruh <i>stakeholder</i> terkait posisi dan tupoksi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu.	
		Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung	<p>Konflik Ciri Khas Bentuk Warung (K2,I1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memberikan arahan kepada paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung untuk mengembalikan bentuk bangunan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan ciri khas Wisata Kuliner Payung. (Ms2) Sedangkan pedagang Wisata Kuliner Payung sudah mengubah bentuk-bentuk warung seperti desain warung pada umumnya dengan tujuan untuk menarik minat pengunjung yang semakin berkurang. (Ms2)</p> <p>Sehingga dibutuhkan arahan pengelolaan supaya lokasi Wisata Kuliner Payung tetap memiliki ciri khas tanpa mengurangi jumlah pengunjung yang datang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung (A2,I1)
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Perum Perhutani KPH Malang • Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung 	<p>Konflik Penambahan Lokasi Pembangunan Warung (K1,I2) Paguyuban pedagang merencanakan adanya penambahan lokasi untuk pembangunan warung baru dengan ijin Perum Perhutani KPH Malang. (Ms1) Sedangkan dari BPBD merencanakan untuk melakukan pengeprasan tebing pada lokasi yang digunakan sebagai pembangunan warung baru dengan tujuan menghindari bencana tanah longsor. (Ms1)</p> <p>Sehingga dibutuhkan batas yang jelas terkait lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi wisata.</p>	Penentuan batas kawasan yang diperbolehkan terdapat aktivitas masyarakat (A1,I2)
		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto)	<p>Konflik Pemberdayaan Pedagang Wisata Kuliner Payung (K2,I2) BPBD mengarahkan bahwa LPMK Songgokerto sebagai lembaga yang bertanggung jawab terkait perbedaan masyarakat harus bisa memberikan pemahaman kepada pedagang terkait dengan pengelolaan wisata dengan diimbangi oleh pengelolaan lingkungan yang baik. (Ms2) Sedangkan, menurut LPMK Songgokerto tugas LPMK hanya terkait dengan pendampingan</p>	Pertegasan setiap fungsi dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung (A2,I2)

No.	Stakeholder	Stakeholder yang Terlibat Konflik	Konflik yang Terjadi	Arahan Alternatif Pengelolaan*
			pedagang untuk mengembangkan kegiatan wisatanya saja. (Ms2) Sehingga dibutuhkan kejelasan terkait tugas masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung.	
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	Perum Perhutani KPH Malang	<p>Konflik Pemanfaatan Fungsi Hutan (K1,I3) Bappeda mengarahkan lokasi Wisata Kuliner Payung masuk dalam kawasan hutan penyangga dengan arahan kegiatan konservasi dan kegiatan ekonomi. (Ms1) Sedangkan pemanfaatan fungsi hutan yang dilakukan Perum Perhutani KPH Malang lebih didominasi oleh kegiatan ekonomidan tidak diimbangi oleh kegiatan konservasi. (Ms1) Sehingga dibutuhkan peraturan yang khusus mengatur kegiatan ekonomi dan kegiatan wisata dan membentuk kelembagaan yang memiliki tugas mengatur seluruh kegiatan konservasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program konservasi yang mengacu pada fungsi kawasan hutan penyangga (A1,I3)
		Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung	<p>Konflik Peluang Pengembangan Usaha (K2,I3) Lokasi Wisata Kuliner Payung masuk ke dalam wilayah Kota Batu sehingga Bappeda mengharapkn kegiatan tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat khususnya Kelurahan Songgokerto, namun jumlah pedagang yang berhasil dari Kelurahan Songgokerto hanya ada 6 orang dari total pedagang sebanyak 114 orang sehingga menyebabkan keterlibatan dari pemerintah Kota Batu tidak berperan dengan optimal. (Ms2) Sedangkan paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kota Batu untuk mendukung pengembangan kegiatan Wisata Kuliner Payung. (Ms2) Sehingga dibutuhkan pengembangan pengelolaan Wisata Kuliner Payung dengan tujuan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kelurahan Songgokerto.</p>	Membuka peluang usaha baru dengan melibatkan masyarakat lokal (A3,I3)

No.	Stakeholder	Stakeholder yang Terlibat Konflik	Konflik yang Terjadi	Arahan Alternatif Pengelolaan*
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> Perum Perhutani KPH Malang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto) Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung 	<p>Konflik Pembuatan Ijin Lingkungan oleh Pedagang (K1,I4)</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu memberikan arahan untuk pembuatan ijin lingkungan berupa AMDAL perubahan fungsi hutan sebagai lokasi wisata kuliner. (Ms1) Sedangkan paguyuban tidak melaksanakan pembuatan AMDAL karena menilai dampak yang diberikan oleh kegiatan wisata tidak memberikan pengaruh buruk terhadap hutan. (Ms2) Selain itu menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu seharusnya Perum Perhutani KPH Malang dan LPMK Songgokerto ikut terlibat dengan cara memberikan pendampingan dan pengarahan terkait proses penyusunan AMDAL. Namun, hal tersebut tidak dilakukan sehingga dibutuhkan arahan pembuatan peraturan terkait penyusunan dokumen AMDAL supaya tidak menghambat proses perijinan. (Ms3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen AMDAL (A1,I4)
5.	Perum Perhutani KPH Malang	Pemerintah Kota Batu (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)	<p>Konflik Proses Pembuatan Peraturan dan Proses Perijinan Wisata Kuliner Payung (K1,I5)</p> <p>Perum Perhutani KPH Malang meminta adanya kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu untuk mengatur seluruh kegiatan Wisata Kuliner Payung. (Ms1) Sedangkan dari Pemerintah Kota Batu belum membuat kebijakan atau peraturan terkait Wisata Kuliner Payung hal ini disebabkan prosedur pendirian usaha di Wisata Kuliner Payung belum selesai karena dari pihak Perhutani belum mengeluarkan dokumen kerjasama dengan paguyuban. (Ms2) Sehingga dibutuhkan penyelesaian perijinan kegiatan Wisata Kuliner Payung serta penyusunan peraturan atau kebijakan yang mengatur kegiatan di Wisata Kuliner Payung</p>	Pembuatan peraturan serta penentuan batasan-batasan lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pemanfaatan kawasan payung agar tidak ada konflik sosial antara pedagang dan pemerintah (A1,I5)
6.	Lembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto	<ul style="list-style-type: none"> Perum Perhutani KPH Malang Paguyuban Pedagang Wisata 	<p>Konflik Sewa Lokasi (K1,S1)</p> <p>Belum ada dokumen perjanjian yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani KPH Malang sebagai bukti ijin membangun warung. (Ms1) Sedangkan para pedagang</p>	Pertegasan bentuk perjanjian kerjasama dengan Perhutani KPH Malang (A1,S1)

No.	Stakeholder	Stakeholder yang Terlibat Konflik	Konflik yang Terjadi	Arahan Alternatif Pengelolaan*
	(LPMK Songgokerto)	Kuliner Payung	Wisata Kuliner Payung sudah membayar harga sewa lahan setiap bulannya kepada Perum Perhutani KPH Malang. (Ms1) Sehingga dibutuhkan penjelasan dari pihak perhutani terkait alasan tidak dikeluarkannya dokumen perijinan dari Perhutani KPH Malang.	
		Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung	Konflik Operasional Warung (K2,S1) LPMK Songgokerto memberikan arahan untuk memberikan standarisasi harga setiap barang serta sistem pengelolaan kegiatan di warung dengan tujuan memberikan kenyamanan kepada pengunjung. (Ms1) Sedangkan paguyuban pedagang tidak setuju dengan arahan tersebut, karena pedagang Wisata Kuliner Payung tidak bisa mengambil keuntungan lebih dengan cara menaikkan harga barang ketika liburan. (Ms2)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standarisasi operasional warung (A2,S1) • Pengelolaan Kawasan Wisata melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (A3,S1)
7.	Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung	Pemerintah Kota Batu (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik Penentuan Batas Wilayah Lokasi Wisata Kuliner Payung (K1,M1) Pemerintah Kota Batu melarang adanya penambahan lokasi Wisata Kuliner Payung (Ms1), sedangkan paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung merencanakan penambahan lokasi Wisata Kuliner Payung karena belum ada penentuan batas wilayah yang boleh digunakan sebagai lokasi wisata. (Ms1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan lokasi penambahan Wisata Kuliner Payung (A1,M1)
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung • Perum Perhutani KPH Malang 	Konflik Proses Perijinan (K1,I6) Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu proses perijinan Wisata Kuliner Payung belum selesai. (Ms1) Hal ini disebabkan proses perijinan pendirian bangunan warung yang dilakukan oleh paguyuban belum mendapatkan Surat Keputusan Perijinan dari Perum Perhutani KPH Malang sebagai pemilik lahan. (Ms2) Sehingga berpengaruh kepada terhambatnya proses perijinan yang dilakukan paguyuban kepada Pemerintah Kota Batu.	Pemenuhan prosedur perijinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (A1,I6)
9.	Pemerintah Kelurahan Songgokerto	Paguyuban Pedagang Jagung Bakar Wisata Kuliner Payung	Konflik terkait pemanfaatan air bersih serta pengelolaan sampah (K1,I7) <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kelurahan Songgokerto menyediakan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan konservasi sumberdaya air tanah (A1,I7)

No.	Stakeholder	Stakeholder yang Terlibat Konflik	Konflik yang Terjadi	Arahan Alternatif Pengelolaan*
			bersih kepada pedagang Wisata Kuliner Payung untuk memenuhi kegiatan berdagang, (Ms1) sedangkan pedagang Wisata Kuliner Payung menggunakan air bersih tidak hanya untuk memenuhi kegiatan berdagang tetapi untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. (Ms1)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) (A2,I7)
			<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kelurahan Songgokerto mengarahkan untuk membuat tempat pengumpulan sampah bersama untuk mengelola sampah yang ditimbulkan dari kegiatan wisata dan berdagang (Ms2), sedangkan dari paguyuban Wisata Kuliner Payung mengarahkan untuk pengelolaan sampah secara individu sehingga menyebabkan banyak pedagang yang membuang sampah ke kawasan hutan. (Ms2) 	
10.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	-	Tidak Terjadi Konflik (S1)	-

Keterangan :

K1,K2,.... Kn : Konflik 1, Konflik 2,....., Konflik n

A1,A2,.... An : Alternatif 1, Alternatif 2,....., Alternatif n

Ms1,Ms2,.... Msn : Masalah 1, Masalah 2,....., Masalah n

I1,I2,.... In : Instansi 1, Instansi 2,....., Instansi n

M1,M2,....Mn : Masyarakat 1, Masyarakat 2,....., Masyarakat n

S1,S2,.....Sn : Swasta 1, Swasta 2,....., Swasta n

* : diperoleh dari setiap *stakeholder*

Berdasarkan **Tabel 4.6** diketahui bahwa terdapat *stakeholder* yang saling terlibat konflik dan terdapat *stakeholder* yang tidak terlibat konflik dengan *stakeholder* yang lain. *Stakeholder* yang tidak terlibat konflik dengan *stakeholder* lain adalah PT. Indofood Sukses Makmur. Hal ini disebabkan oleh fungsi dari PT. Indofood Sukses Makmur adalah sebagai kelompok pemasok barang makanan kepada pedagang-pedagang di Wisata Kuliner Payung. PT. Indofood Sukses Makmur hanya melakukan interaksi dengan paguyuban dan pedagang sehingga semakin kecil potensi konflik yang dapat timbul.

Stakeholder yang mengalami konflik pada pengelolaan Wisata Kuliner terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto, paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung. Secara umum konflik pengelolaan yang terjadi terkait pengelolaan Wisata Kuliner Payung adalah tidak ada peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung serta lokasi Wisata Kuliner Payung berada di lokasi yang rawan bencana longsor sehingga memiliki tingkat bahaya untuk dikembangkan. Tetapi paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung ingin mengembangkan Wisata Kuliner Payung untuk mendukung pengembangan Wisata Kuliner Payung dengan wisata-wisata yang baru. Tetapi, berdasarkan **Tabel 4.6** dapat dilihat bahwa terdapat 14 konflik pengelolaan yang terjadi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung. berdasarkan 14 konflik tersebut terdapat beberapa konflik yang saling berhubungan namun berbeda sudut pandang *stakeholder* dalam menanggapi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di pengelolaan Wisata Kuliner Payung adalah sebagai berikut.

1. Konflik Proses Perijinan Wisata Kuliner Payung

Proses perijinan Wisata Kuliner Payung belum selesai yang disebabkan oleh belum terpenuhi seluruh prosedur perijinan. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak paguyuban Wisata Kuliner Payung adalah membuat kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Malang yaitu dengan membayar sewa lahan setiap satu bulan sekali kepada Perum Perhutani KPH Malang kemudian Perum Perhutani akan memberikan Surat Keputusan Perijinan kepada Wisata Kuliner Payung. Setelah memperoleh ijin dari Perum Perhutani KPH Malang maka paguyuban dapat melakukan proses perijinan kepada Pemerintah Kota Batu. Namun, kondisi yang terjadi adalah Perum Perhutani KPH Malang belum mengeluarkan Surat Keputusan Perijinan tersebut. Sehingga, secara langsung menghambat proses perijinan kepada Pemerintah Kota Batu. Selain itu, terdapat salah satu prosedur perijinan yang belum dibuat oleh paguyuban Wisata Kuliner Payung yaitu penyusunan dokumen AMDAL. Hal ini disebabkan kegiatan yang ada di Wisata Kuliner Payung sudah mengubah peruntukan fungsi hutan. Konflik ini melibatkan Perum Perhutani KPH Malang dan LPMK Songgokerto karena seharusnya kedua *stakeholder* tersebut memberikan pendampingan dan pengarahan terkait dengan penyusunan AMDAL namun hal tersebut tidak dilakukan.

2. Konflik Kebijakan atau Peraturan Wisata Kuliner payung

Konflik ini dipengaruhi oleh konflik yang sebelumnya yaitu proses perijinan yang belum selesai sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan Wisata Kuliner Payung. Saat ini pada proses pengelolaan Wisata Kuliner Payung tidak terdapat kebijakan yang dijadikan acuan. Sehingga ketika terjadi perbedaan pengelolaan tidak ada dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan. Ketidakadaan kebijakan atau peraturan juga berhubungan dengan konflik terkait penentuan batas lokasi Wisata Kuliner Payung. Penentuan batas ini menjadi salah satu konflik yang belum dapat diselesaikan karena hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menyebutkan lokasi yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun sehingga pedagang Wisata Kuliner Payung merasa memiliki kebebasan membuka lokasi baru untuk membangun bangunan warung baru.

3. **Konflik Struktur Organisasi dan Kejelasan Tupoksi dari Masing-Masing Stakeholder**
Konflik ini menjadi salah satu konflik yang menghambat pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Hal ini dapat dilihat masih ada tumpang tindih dari tupoksi masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Konflik semakin diperkuat karena terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing *stakeholder*, baik pendapat dari tugas *stakeholder* itu sendiri dan pemahaman tugas *stakeholder* yang lain terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung.
4. **Konflik Pemanfaatan Hutan**
Meskipun belum terdapat kebijakan atau peraturan yang mengatur Wisata Kuliner Payung, namun peruntukan hutan yang digunakan sebagai lokasi Wisata Kuliner Payung sudah diatur dalam RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 yaitu sebagai hutan penyangga dengan kegiatan konservasi dan kegiatan ekonomi. Kedua kegiatan tersebut seharusnya dilakukan secara seimbang sehingga tidak ada komponen yang dirugikan. Namun, kondisi ini menjadi konflik karena pemanfaatan yang dilakukan lebih didominasi dengan kegiatan ekonomi yang tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi.
5. **Konflik Operasional Kegiatan Wisata Kuliner Payung**
Konflik ini terdiri dari penentuan standarisasi harga barang, pemanfaatan air dan pengelolaan limbah. Konflik yang berkaitan standarisasi harga barang terjadi antara paguyuban atau pedagang dengan LPMK Kelurahan Songgokerto. Konflik lain yang muncul adalah penggunaan air yang dilakukan oleh pedagang di Wisata Kuliner Payung tidak hanya untuk kegiatan berdagang tapi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pedagang juga tidak mampu melakukan pengelolaan sampah secara komunal

sehingga banyak pedagang yang membuang sampah ke hutan yang ada di bawah lokasi berdagang.

6. Konflik Terkait Bentuk Bangunan

Konflik ini terjadi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dengan paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung. Konflik tidak berhubungan dengan konflik lain atau dapat dikatakan konflik ini berjalan sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan **Tabel 4.6** dapat dilihat bahwa masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam konflik pengelolaan Wisata Kuliner Payung memiliki alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan arahnya masing-masing. Terdapat 17 arah alternatif pengelolaan yang diperoleh dari masing-masing *stakeholder*, namun terdapat beberapa alternatif pengelolaan yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, sehingga dapat dilakukan proses reduksi dengan tujuan mengelompokkan alternatif yang sama. Proses reduksi alternatif pengelolaan dapat dilihat pada **Lampiran 11**. Selanjutnya hasil dari reduksi alternatif digunakan sebagai alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang akan dinilai dengan menggunakan analisis *Multi Criteria Decision Making* sehingga diperoleh urutan prioritas alternatif. Berikut merupakan daftar alternatif kebijakan dengan kode dari masing-masing alternatif hasil dari analisis konflik.

Tabel 4. 7
Alternatif Pengelolaan

Kode	Alternatif Pengelolaan
A1	Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup dan wisata
A2	Penyusunan standarisasi operasional warung
A3	Penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan
A4	Pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah)
A5	Pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung
A6	Pengelolaan Kawasan Wisata dengan melibatkan masyarakat lokal Kota Batu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
A7	Penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung

4.4 Analisis Stakeholder

Wisata Kuliner Payung Kota Batu merupakan sebuah wisata yang pengelolaannya melibatkan beberapa *stakeholder*, sehingga dilakukan analisis *stakeholder* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan aktor melalui tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung di Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dan pendalaman maka diperoleh 10 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan

Wisata Kuliner Payung. **Tabel 4.8** menjelaskan fungsi masing-masing *stakeholder* yang terlibat.

Tabel 4. 8

Fungsi Stakeholder terhadap Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

No.	Stakeholder	Fungsi
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	Pembina pelaku Wisata Kuliner Payung
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	Pengelolaan bencana di kawasan Wisata Kuliner Payung
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	Pembuatan kebijakan atau peraturan terkait dengan pengelolaan Wisata Kuliner Payung
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	Pemberi perijinan lingkungan hidup dan pengelolaan AMDAL
5.	Perum Perhutani KPH Malang	Pengelola sumberdaya hutan di KPH Pujon dengan mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto)	Pembimbing, pembina dan pemberi wawasan kepada pedagang Wisata Kuliner Payung
7.	Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung	Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang berada pada lokasi Wisata Kuliner Payung, baik perijinan serta pengelolaan
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Penyelenggaraan Pelayanan administrasi di bidang perijinan pendirian bangunan di Wisata Kuliner Payung
9.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	Kelompok pemasok barang makanan kepada pedagang-pedagang di Wisata Kuliner Payung
10.	Kelurahan Songgokerto	Pengawas dan membina paguyuban serta pedagang di Wisata Kuliner Payung

Setelah diketahui peran dari masing-masing *stakeholder*, langkah selanjutnya yang dilakukan pada tahap analisis *stakeholder* adalah mengkategorikan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Para *stakeholder* dipetakan ke dalam matriks analisis *stakeholder* berdasarkan besarnya kepentingan dan pengaruh.

Penilaian besarnya kepentingan dan pengaruh *stakeholder* menggunakan skala linkert yaitu sebagai berikut.

Nilai 5 : sangat tinggi

nilai 4 : tinggi

nilai 3 : cukup

nilai 2 : kurang tinggi

nilai 1 : rendah

Dimana jumlah maksimum nilai yang akan diperoleh *stakeholder* adalah 25 poin untuk besarnya kepentingan dan 25 poin untuk besarnya pengaruh. Penilaian besarnya kepentingan *stakeholder* pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung di Kota Batu dapat dilihat pada **Tabel 4.9.**

Tabel 4. 9
Penilaian Tingkat Kepentingan Stakeholder

No.	Stakeholder	K1	K2	K3	K4	K5	Nilai
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	5	4	5	3	5	22
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	5	3	5	2	4	19
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	3	1	3	2	3	12
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	5	1	3	1	3	13
5.	Perum Perhutani KPH Malang	5	4	5	4	5	23
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto)	5	4	5	4	5	23
7.	Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung	5	5	5	5	5	25
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	3	1	2	1	2	9
9.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	3	2	3	3	1	12
10.	Kelurahan Songgokerto	5	3	4	3	4	19

Keterangan:

K1 : Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung

K2 : Ketergantungan stakeholder terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung

K3 : Peran masing-masing stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan Wisata Kuliner Payung

K4 : Manfaat yang diperoleh stakeholder dari pengelolaan Wisata Kuliner Payung

K5 : Kepentingan stakeholder terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* pengelolaan Wisata Kuliner Payung pada **Tabel 4.9**, dapat dilihat bahwa paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung memiliki nilai kepentingan paling tinggi yang diikuti oleh pedagang Wisata Kuliner Payung, Lembaga Swadaya Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto) dan Perum Perhutani KPH Malang. Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung sebagai pengelola Wisata Kuliner Payung memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberlanjutan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang baik. Keberadaan paguyuban tersebut mampu mengatur secara langsung sistem perdagangan dan sistem keuangan yang ada di Wisata Kuliner Payung, dengan pengelolaan yang baik dari paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung diharapkan dampak negatif dari adanya perdagangan di lokasi rawan bencana tanah longsor dapat diminimalisir, serta konflik pengelolaan Wisata Kuliner Payung dapat diselesaikan dengan baik. Berbeda dengan

kepentingan Paguyuban pedagang jagung Wisata Kuliner Payung, pedagang Wisata Kuliner Payung memiliki kepentingan sebagai masyarakat baik masyarakat asli Kota Batu maupun di luar Kota Batu yang bekerja di Wisata Kuliner Payung, sebagian besar dari mereka menjadikan berdagang di Wisata Kuliner Payung sebagai pekerjaan utama mereka. Sedangkan Perum Perhutani KPH Malang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi karena lokasi Wisata Kuliner Payung berada pada kawasan hutan peyangga yang masuk di dalam kawasan pengelolaan Perum Perhutani KPH Malang. Selain itu, pengurusan perijinan adanya Wisata Kuliner Payung juga dilakukan kepada Perum Perhutani KPH Malang. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto) memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung yaitu sebagai lembaga yang memberikan bimbingan, binaan dan wawasan secara langsung kepada pedagang di Wisata Kuliner Payung sehingga pedagang mampu mengelola sistem perdagangan dengan baik tanpa memberikan kerugian kepada lingkungan sekitar.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memiliki kepentingan sebagai pemerintah daerah yang melakukan pembinaan kepada paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung dan para pedagang, sehingga paguyuban dan pedagang dapat terus mengembangkan Wisata Kuliner Payung dengan baik. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu memiliki kepentingan terkait dengan pengelolaan dan pencegahan bencana alam yang terjadi di lokasi Wisata Kuliner Payung. Selain itu, Kelurahan Songgokerto memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan BPBD Kota Batu yaitu sebagai pengawas jalannya perdagangan dan wisata di Wisata Kuliner Payung serta melaporkan kepada pemerintah daerah jika terjadi permasalahan di Wisata Kuliner Payung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung terkait pengelolaan AMDAL yang seharusnya dilakukan ketika mulai membangun bangunan warung. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu memiliki kepentingan sebagai perlindungan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Supplier barang yaitu PT. Indofood Sukses Makmur memiliki kepentingan yaitu sebagai pemasok barang kepada pedagang-pedagang yang berada di Wisata Kuliner Payung. Stakeholder terakhir yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung adalah masyarakat Kelurahan Songgokerto, tetapi masyarakat Kelurahan Songgokerto memiliki tingkat kepentingan paling rendah hal ini disebabkan oleh jumlah masyarakat Kelurahan Songgokerto yang bekerja sebagai pedagang di lokasi Wisata Kuliner Payung sangat rendah, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Batu memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena tidak mengatur langsung proses perijinan pembangunan warung di Wisata Kuliner Payung. Penilaian stakeholder selanjutnya yaitu dari tingkat pengaruh stakeholder, yang dapat dilihat dari **Tabel 4.10**.

Tabel 4. 10
Penilaian Tingkat Pengaruh Stakeholder

No.	Stakeholder	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	5	5	5	4	4	23
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	4	5	4	4	4	22
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	3	5	2	2	5	17
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	3	5	1	1	2	12
5.	Perum Perhutani KPH Malang	5	5	4	5	3	22
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto)	3	3	1	1	4	12
7.	Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung	3	3	3	3	4	16
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	4	5	3	2	3	17
9.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	1	1	3	3	1	9
10.	Kelurahan Songgokerto	3	3	3	2	3	14

Keterangan:

P1 : Instrumen dan sumber kekuatan (power) yang dimiliki masing-masing stakeholder

P2 : Posisi derajat stakeholder dalam pembuatan keputusan

P3 : Dukungan SDM terhadap pengelolaan Wisata Kuliner payung

P4 : Kemampuan pendanaan dan manajemen terhadap pengelolaan Wisata Kuliner payung

P5 : Interaksi dengan stakeholder yang lain

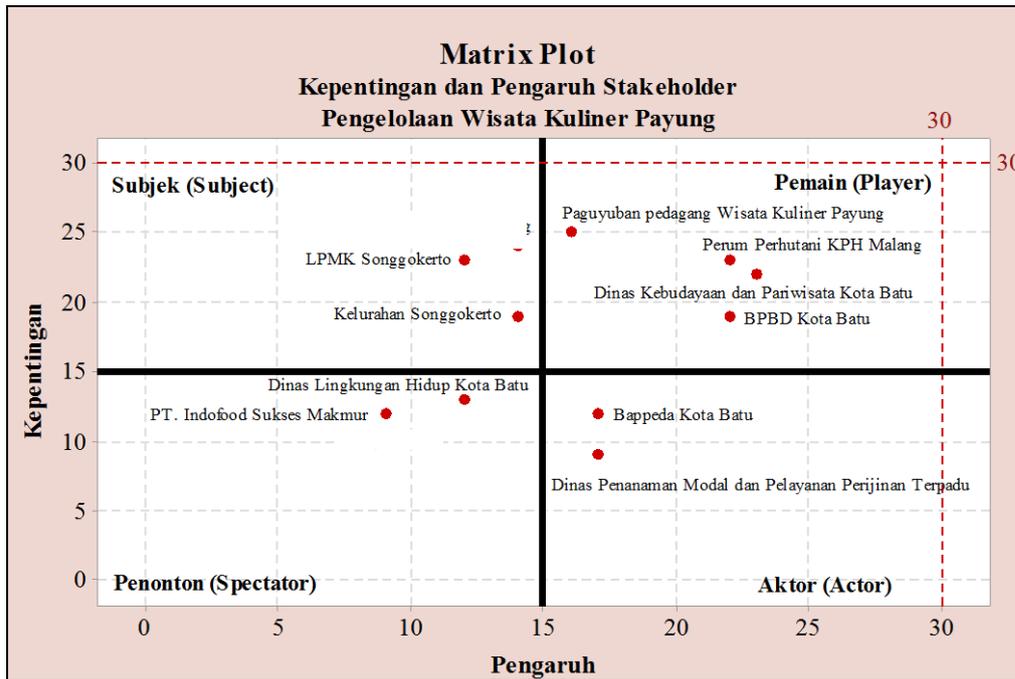
Berdasarkan **Tabel 4.10** dapat dilihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memiliki tingkat pengaruh yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Kota Batu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memiliki pengaruh yang tinggi karena Wisata Kuliner Payung merupakan salah satu aset wisata Kota Batu, sehingga kebijakan pengembangan Wisata Kuliner Payung menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu memiliki tingkat pengaruh yang tinggi berkaitan dengan kejadian bencana yang bisa terjadi pada lokasi Wisata Kuliner Payung serta sebagai stakeholder yang bertindak langsung dalam pencegahan terjadinya tanah longsor. Perum Perhutani KPH Malang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberlanjutan Wisata Kuliner Payung karena lokasi dan perijinan kegiatan Wisata Kuliner Payung berada dalam pengelolaan Perum Perhutani KPH Malang. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki pengaruh sedang karena kedua *stakeholder* tersebut memiliki posisi derajat yang tinggi dalam pengambilan keputusan tetapi tidak didukung oleh kemampuan pendanaan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung, selain itu ijin terhadap pembangunan warung di Wisata Kuliner Payung tidak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu melainkan melalui Perum Perhutani KPH Malang.

Paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung berpengaruh dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung karena paguyuban memiliki struktur kelembagaan yang mendukung sistem pengelolaan Wisata Kuliner Payung dan paguyuban yang berfungsi sebagai penghubung antara pedagang dengan *stakeholder* yang lain. Pedagang dan Kelurahan Songgokerto memiliki pengaruh yang rendah karena dilihat dari posisi dan kekuatannya dalam pengambilan keputusan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu memiliki pengaruh yang rendah karena tidak didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaan yang diberikan langsung terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung, sedangkan Kelurahan Songgokerto memiliki pengaruh yang rendah tidak memiliki kemampuan pendanaan secara langsung yang diberikan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan Wisata Kuliner Payung, Kelurahan Songgokerto hanya berperan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pedagang dan sebagai penampung opini masyarakat Kelurahan Songgokerto jika terjadi permasalahan berkaitan dengan Wisata Kuliner Payung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK Songgokerto) memiliki pengaruh yang rendah terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang disebabkan oleh rendahnya dukungan sumber daya manusia dan pendanaan dalam keberlanjutan pengembangan Wisata Kuliner Payung. Masyarakat Kelurahan Songgokerto memiliki pengaruh yang rendah karena mereka tidak memiliki kemampuan pendanaan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung serta tidak melakukan interaksi atau hubungan dengan *stakeholder* lain. PT. Indofood Sukses Makmur memiliki pengaruh paling rendah karena keterlibatannya dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung hanya sebagai pemasok barang dan tidak memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan, pendanaan serta interaksi dengan *stakeholder* lain selain paguyuban Wisata Kuliner Payung.

Setelah dilakukan tahap identifikasi pemetaan kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Kemudian dilakukan pemetaan ke dalam matriks analisis grid *stakeholder*. Matriks tersebut dibuat dengan menggunakan *software minitab 17* yang terdiri dari 4 kuadran, yaitu penonton (*spectator*), aktor (*actor*), Subjek (*subject*) dan pemain (*player*). Posisi dari masing-masing *stakeholder* akan dipetakan sesuai dengan hasil

penilaian tingkat kepentingan dan pengaruh. Sehingga menghasilkan matrik plot pada **Gambar 4.13**.



Gambar 4. 13 Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Stakeholder yang masuk pada kuadran Penonton (*Spectator*) adalah kelompok *stakeholder* yang rendah pengaruh dan kepentingannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup, PT. Indofood Sukses Makmur dan masyarakat Kelurahan Songgokerto. Keberadaan ketiga *stakeholder* tersebut dinilai tidak terlalu tergantung kepada Wisata Kuliner Payung dan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup seharusnya terlibat dalam pengelolaan lingkungan di Wisata Kuliner Payung tetapi pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup tidak terlibat dalam pengelolaan seperti dalam pembuatan AMDAL. PT. Indofood Sukses Makmur memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengembangkan aktivitas usahanya, sehingga tidak bergantung kepada keberadaan Wisata Kuliner Payung. Masyarakat Kelurahan Songgokerto yang memiliki usaha di Wisata Kuliner Payung berjumlah sangat sedikit sehingga tidak tergantung kepada Wisata Kuliner Payung.

Stakeholder yang berada pada kuadran Aktor (*Actor*) adalah kelompok *stakeholder* yang berpengaruh tetapi rendah kepentingannya dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan yaitu Bappeda Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Kedua *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh yang tinggi dengan sedikit kepentingan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Keduanya memiliki pengaruh yang tinggi karena memiliki kekuatan dan posisi derajat yang tinggi dalam pengambilan keputusan,

tetapi dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung mereka tidak memiliki kepentingan secara langsung.

Stakeholder yang berada pada kuadran Subjek (*Subject*) adalah kelompok *stakeholder* yang memiliki derajat yang tinggi terhadap kepentingan tetapi rendah pengaruhnya yaitu pedagang Wisata Kuliner Payung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Songgokerto dan Kelurahan Songgokerto. Ketiga *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang berkelanjutan. Pedagang Wisata Kuliner Payung memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung karena mereka menggantungkan pekerjaan mereka kepada Wisata Kuliner Payung namun mereka tidak memiliki kekuatan yang tinggi untuk ikut mengambil kepentingan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Songgokerto dan Kelurahan Songgokerto sama-sama memiliki kepentingan yang tinggi yaitu sebagai pembimbing dan membina pedagang di Wisata Kuliner Payung tetapi keduanya tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

Stakeholder yang masuk pada kuadran Pemain (*Player*) adalah kelompok *stakeholder* yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi yaitu paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang dan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Batu. Semua *stakeholder* yang masuk pada kuadran ini sama-sama memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Sehingga, keberlanjutan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sebagai wewenang mereka sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Paguyuban dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengembangan Wisata Kuliner Payung agar tidak mengalami kalah bersaing dengan wisata-wisata yang baru serta didukung dengan kepentingan Perum Perhutani KPH Malang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan bencana dan potensi hutan yang ada disekitar lokasi Wisata Kuliner Payung. keempat *stakeholder* tersebut terlibat langsung dengan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sehingga pada tahap analisis selanjutnya yaitu metode TOPSIS, empat *stakeholder* tersebut akan menilai prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan.

4.5 Identifikasi Stakeholder yang Terlibat Konflik dengan Posisi Kuadran Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Melalui hasil analisis konflik diperoleh hasil yaitu *stakeholder* yang terlibat konflik pengelolaan dan *stakeholder* yang tidak terlibat konflik pengelolaan pengelolaan Wisata

Kuliner Payung. Sedangkan, berdasarkan hasil analisis *stakeholder* dan pemetaan posisi *stakeholder* diperoleh hasil yaitu posisi masing-masing *stakeholder* yang terdiri dari *stakeholder player*, *stakeholder subject*, *stakeholder actor*, dan *stakeholder spectator*. Tujuan dari identifikasi *stakeholder* yang terlibat konflik dengan posisi kuadran kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* adalah untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat konflik pengelolaan berada di posisi kuadran apa. *Stakeholder* yang terlibat konflik pengelolaan dan posisi kuadran *stakeholder* dapat dilihat di **Tabel 4.11**.

Tabel 4. 11

Hasil Identifikasi Stakeholder yang Terlibat Konflik dengan Posisi Kuadran Stakeholder

No.	Stakeholder	Konflik Pengelolaan	Posisi Kuadran
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memberikan arahan untuk mengembalikan bentuk bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas Wisata Kuliner Payung sedangkan para pedagang di Wisata Kuliner Payung sudah mengubah bentuk-bentuk warung mereka seperti desain warung-warung pada umumnya. Konflik berkaitan dengan proses perijinan Wisata Kuliner Payung yaitu prosedur perijinan pendirian warung di Wisata Kuliner Payung belum dilakukan dengan baik, sehingga ijin tertulis pengadaan Wisata Kuliner Payung belum ada. Pedagang Wisata Kuliner Payung 95% adalah penduduk luar Kota Batu sehingga pemerintah Kota Batu tidak bisa memberikan bantuan dana untuk pengembangan pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Hutan yang digunakan sebagai lokasi wisata kuliner adalah hutan penyangga dengan kepentingan konservasi dan kegiatan ekonomi, namun kondisi yang terjadi dilokasi Wisata Kuliner Payung, Perum Perhutani KPH Malang lebih mengutamakan kegiatan ekonomi dan tidak diimbangi oleh kegiatan konservasi. Adanya pedagang yang membangun warung baru dilokasi yang menurut pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani Kota Batu adalah lokasi rawan tanah longsor. 	<i>Stakeholder Player</i>
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> Proses perijinan kegiatan Wisata Kuliner Payung yang berada pada hutan peyangga bagi masyarakat Kelurahan Songgokerto belum diproses dengan baik. Adanya pedagang yang membangun warung baru dilokasi yang menurut pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani Kota Batu adalah lokasi rawan tanah longsor. Hutan yang digunakan sebagai lokasi wisata kuliner adalah hutan penyangga dengan kepentingan konservasi dan kegiatan ekonomi, namun kondisi yang terjadi dilokasi Wisata Kuliner Payung, Perum Perhutani KPH Malang lebih mengutamakan kegiatan ekonomi dan tidak diimbangi oleh kegiatan konservasi. 	<i>Stakeholder Player</i>

No.	Stakeholder	Konflik Pengelolaan	Posisi Kuadran
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang Wisata Kuliner Payung 95% adalah penduduk luar Kota Batu sehingga pemerintah Kota Batu tidak bisa memberikan bantuan dana untuk pengembangan pengelolaan Wisata Kuliner Payung. 2. Hutan yang digunakan sebagai lokasi wisata kuliner adalah hutan penyangga dengan kepentingan konservasi dan kegiatan ekonomi, namun kondisi yang terjadi dilokasi Wisata Kuliner Payung, Perum Perhutani KPH Malang lebih mengutamakan kegiatan ekonomi dan tidak diimbangi oleh kegiatan konservasi. 	<i>Stakeholder Actor</i>
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik berkaitan dengan proses perijinan Wisata Kuliner Payung yaitu prosedur perijinan pendirian warung di Wisata Kuliner Payung belum dilakukan dengan baik, sehingga ijin tertulis pengadaan Wisata Kuliner Payung belum ada. 	<i>Stakeholder Spectator</i>
5.	Perum Perhutani KPH Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perijinan kegiatan Wisata Kuliner Payung yang berada pada hutan penyangga bagi masyarakat Kelurahan Songgokerto belum diproses dengan baik. 2. Adanya pedagang yang membangun warung baru dilokasi yang menurut pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani Kota Batu adalah lokasi rawan tanah longsor. 3. Perum Perhutani tidak memberikan bantuan dana pengelolaan Wisata Kuliner Payung. 4. Hutan yang digunakan sebagai lokasi wisata kuliner adalah hutan penyangga dengan kepentingan konservasi dan kegiatan ekonomi, namun kondisi yang terjadi dilokasi Wisata Kuliner Payung, Perum Perhutani KPH Malang lebih mengutamakan kegiatan ekonomi dan tidak diimbangi oleh kegiatan konservasi. 	<i>Stakeholder Player</i>
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa pedagang yang mengambil air berlebih sehingga menyebabkan masyarakat yang berada di bawah lokasi wisata mengalami kekurangan air. 2. Masyarakat Kelurahan Songgokerto juga terganggu terhadap sistem pengelolaan sampah dan limbah dari kegiatan di Wisata Kuliner Payung yang tidak dikelola dengan baik 	<i>Stakeholder Subject</i>
7.	Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya bantuan dana dari Pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Malang sehingga pedagang Wisata Kuliner Payung tidak mampu meningkatkan daya saing dengan wisata—wisata yang baru. 2. Pedagang di Wisata Kuliner Payung tidak memiliki standar harga sehingga berpengaruh terhadap minat konsumen untuk kembali datang ke Wisata Kuliner Payung. 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memberikan arahan untuk mengembalikan bentuk bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas Wisata Kuliner Payung sedangkan para pedagang di Wisata Kuliner Payung sudah mengubah bentuk-bentuk warung mereka seperti desain warung-warung pada umumnya. 	<i>Stakeholder Player</i>

No.	Stakeholder	Konflik Pengelolaan	Posisi Kuadran
		4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu memberikan arahan untuk mengembalikan bentuk bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas Wisata Kuliner Payung sedangkan para pedagang di Wisata Kuliner Payung sudah mengubah bentuk-bentuk warung mereka seperti desain warung-warung pada umumnya.	
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	1. Proses perijinan kegiatan Wisata Kuliner Payung yang berada pada hutan peyangga bagi masyarakat Kelurahan Songgokerto belum diproses dengan baik.	<i>Stakeholder Actor</i>
9.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	Tidak terlibat konflik	<i>Stakeholder Spectator</i>
10.	Kelurahan Songgokerto	1. Terdapat beberapa pedagang yang mengambil air berlebih sehingga menyebabkan masyarakat yang berada di bawah lokasi wisata mengalami kekurangan air. 2. Masyarakat Kelurahan Songgokerto juga terganggu terhadap sistem pengelolaan sampah dan limbah dari kegiatan di Wisata Kuliner Payung yang tidak dikelola dengan baik	<i>Stakeholder Subject</i>

Berdasarkan **Tabel 4.11** dapat diketahui posisi kuadran dari masing-masing *stakeholder* terhadap tingkat keterlibatan konflik pengelolaan. *Stakeholder* yang memiliki posisi tertinggi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung adalah *stakeholder player* sedangkan *stakeholder* yang memiliki posisi terendah adalah *stakeholder spectator*. **Tabel 4.11** menunjukkan bahwa pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang terlibat konflik paling banyak adalah *stakeholder* pada kuadran *player* sedangkan *stakeholder* yang terlibat konflik paling sedikit adalah *stakeholder* yang berada di kuadran *spectator*.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota batu termasuk dalam *stakeholder player*, *stakeholder* ini terlibat dalam 5 konflik pengelolaan Wisata Kuliner Payung dengan jumlah keterlibatan konflik terbanyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu terlibat 3 konflik pengelolaan, sedangkan untuk Perum Perhutani KPH Malang dan Paguyuban Pedagang Wisata Kuliner Payung terlibat kedalam 4 konflik pengelolaan. Hal tersebut membuktikan bahwa *stakeholder* yang berada pada posisi kuadran tertinggi atau *stakeholder player* juga memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap konflik pengelolaan yang terjadi.

Masyarakat Kelurahan Songgokerto, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dan PT. Indofood Sukses Makmur termasuk kedalam *stakeholder spectator* atau *stakeholder* penonton. *Stakeholder* tersebut adalah *stakeholder* yang berada pada posisi kuadran terendah. Masyarakat Kelurahan Songgokerto terlibat kedalam 2 konflik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terlibat kedalam 1 konflik sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur tidak terlibat konflik pengelolaan pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung. sedikitnya jumlah

keterlibatan konflik pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa posisi kuadran yang rendah berpengaruh pada rendahnya keterlibatan pada konflik pengelolaan yang terjadi.

Namun, untuk *stakeholder* yang berada pada posisi kuadran *stakeholder subject* dan *stakeholder actor* tidak menunjukkan kesamaan tingkat keterlibatan terhadap konflik pengelolaan yang terjadi. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kuadran *stakeholder subject* yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto, pedagang Wisata Kuliner Payung, dan Kelurahan Songgokerto. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto terlibat kedalam 2 konflik pengelolaan, pedagang Wisata Kuliner Payung terlibat kedalam 4 konflik pengelolaan sedangkan Kelurahan Songgokerto tidak terlibat ke dalam konflik pengelolaan. Kemudian untuk *stakeholder* yang masuk pada kuadran *stakeholder actor* yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu terlibat ke dalam 2 konflik pengelolaan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terlibat ke dalam 1 konflik pengelolaan. Kedua posisi kuadran *stakeholder* yang tidak memiliki ketidakseimbangan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh tersebut juga memiliki ketidakseimbangan tingkat keterlibatan terhadap konflik pengelolaan yang terjadi, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan fungsi dan wewenang serta kepentingan pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

4.6 Penentuan Sub Kriteria *Multi Criteria Decision Making*

Penentuan sub kriteria yang digunakan pada analisis *Multi Criteria Decision Making* menggunakan analisis *Delphi*. Dasar penggunaan analisis Delphi pada penelitian ini adalah menentukan sub kriteria yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Wisata Kuliner Payung. Analisis delphi dilakukan dengan teknik wawancara terbuka kepada para pakar yang ahli dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Responden yang dipilih pada penelitian ini adalah 11 pakar yang sama pada masing-masing iterasi yaitu pakar pariwisata, pakar bencana, pakar lingkungan, pakar pemberdayaan masyarakat dan pakar pembangunan daerah.

Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan melalui kuesioner eksplorasi. Tujuan dari pengajuan pertanyaan melalui kuesioner eksplorasi yaitu untuk mengumpulkan pendapat dari 11 pakar terkait sub kriteria yang sesuai untuk menilai alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Pendapat diberikan melalui proses

pengisian kuesioner sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil dari pengumpulan pendapat 11 pakar dapat dilihat pada **Tabel 4.12**.

Tabel 4. 12

Pendapat Pakar Terhadap Sub kriteria Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

No.	Interest	Pakar	Kriteria	Sub Kriteria
1.	Pakar Pariwisata	PK1	Ekonomi	1. Adanya kontribusi pendapatan Wisata Kuliner Payung kepada pendapatan daerah
				2. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata
				3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
			Lingkungan	4. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas
				5. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman atau potensi bencana
				Sosial
			7. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar obyek wisata	
			8. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	
			Kelembagaan	9. Peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat
				10. Adanya upaya promosi wisata
				11. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing lembaga yang terlibat
			2.	Pakar Lingkungan
13. Mampu menambah pemasukan masyarakat lokal lokasi Wisata Kuliner Payung				
Lingkungan	14. Prinsip daya dukung lingkungan memperhatikan tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan ekowisata dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial-budaya			
	15. Pola wisata ramah lingkungan			
	16. Memperhatikan tingkat kerentanan lokasi terhadap bencana longsor			
	17. Kerawanan kecelakaan lalu lintas			
	Sosial	18. Adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan lokasi Payung		
Kelembagaan		19. Kejelasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat kedalam pengelolaan Payung		
	20. Kejelasan perijinan pembangunan bangunan di Wisata Kuliner Payung			
	3.	Pakar Bencana		
Lingkungan			22. Memperhatikan dari risiko bencana yang terjadi pada lokasi payung	
			23. Memperhatikan kesiapsiagaan para pengelola Wisata Kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman atau potensinya	

No.	Interest	Pakar	Kriteria	Sub Kriteria
			Sosial	24. Pemahaman masyarakat lokasi wisata terhadap kelestarian lingkungan
			Kelembagaan	25. Percepatan perijinan lokasi Wisata Kuliner Payung
		PK4	Ekonomi	26. Promosi kawasan untuk meningkatkan jumlah kunjungan
			Lingkungan	27. Pembatasan area yang digunakan untuk tempat warung kuliner 28. Penataan kontruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang
			Sosial	29. Pengaturan legalitas dan batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pemanfaatan kawasan payung agar tidak ada konflik sosial antara pedagang dan pemerintah 30. Penyediaan rest area untuk kendaraan agar tidak mengganggu akses jalan transportasi bagi kendaraan yang melintasi kawasan payung
			Kelembagaan	31. Adanya legalitas usaha dari pengelola wisata kuliner 32. Pembinaan atau standarisasi harga jual makanan secara wajar
4	Pakar Pemberdayaan Masyarakat	PK5	Ekonomi	33. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
			Lingkungan	34. Penataan kerapian bangunan dan penyeragamam cat kios untuk menarik konsumen 35. Menciptakan lingkungan hutan yang asri dan berkesinambungan 36. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan
			Sosial	37. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar obyek wisata 38. Pedagang memahami cara berkomunikasi yang baik dengan pengunjung atau konsumen
			Kelembagaan	39. Perhatian yang lebih real dari pemegang kebijakan (Perhutani) sehingga bisa lebih mudah untuk bisa berinteraksi dengan kelembagaan lain yang terlibat
		PK6	Ekonomi	40. Masyarakat setempat dapat terus mendapatkan penghasilan dari Wisata Kuliner Payung
			Lingkungan	41. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan 42. Kepentingan menjaga lingkungan mulai seperti sampah
			Sosial	43. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan 44. Peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat
			Kelembagaan	45. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung
5.	Pakar Pembangunan Daerah	PK7	Ekonomi	46. Memunculkan multiplier effect bagi pengembangan ekonomi lokal

No.	Interest	Pakar	Kriteria	Sub Kriteria
				47. Memberikan value added bagi kawasan Payung (Seperti= Landmark Songgoriti)
				48. Mengembangkan kawasan wisata melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
				49. Mengembangkan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata
		Lingkungan		50. Pengembangan kawasan dengan limitasi fisik atau keterbatasan
				51. Pengelolaan kawasan dengan pengaturan terhadap tekanan lingkungan (terkait dengan = bentuk bangunan, sistem pembuangan air, persampahan, pembuangan limbah domestik, pembuangan limbah kuliner, dll)
		Sosial		52. Pengembangan upaya promosi wisata ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat melalui slogan atau jargon yang menarik)
				53. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)
		Kelembagaan		54. Pembentukan kelembagaan jasa ekowisata yang diharapkan dapat mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup
				55. Adanya kelembagaan yang mengatur tentang jasa ekowisata dan jasa lingkungan
	PK8	Ekonomi		56. Pengembangan perekonomian berbasis kemasyarakatan
				57. Multiplier Effect Ekowisata
		Lingkungan		58. Pengelolaan Lingkungan oleh masyarakat
				59. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas
		Sosial		60. Pengelolaan lingkungan hidup melalui aktivitas sosial yang positif
		Kelembagaan		61. Pola kelembagaan lingkungan masyarakat setempat untuk pertanggung jawaban kawasan persegmen
	PK9	Ekonomi		62. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal
				63. Adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarakat
				64. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan
		Lingkungan		65. Jumlah pengunjung terbatas atau diatur sesuai daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat
				66. Pengelolaan limbah terpadu
				67. Promosi budaya bersih
		Sosial		68. Kegiatan ekowisata selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
				69. Penerapan tertib dan budaya antri
		Kelembagaan		70. Pembentukan lembaga pengelolaan bersama dengan prinsip adil dan transparan
	PK10	Ekonomi		71. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal

No.	Interest	Pakar	Kriteria	Sub Kriteria
			72. Keterlibatan masyarakat (PKK, Karangtaruna)	
	Lingkungan		73. Tersedianya area lahan parkir (Sarana Prasarana)	
	Sosial		74. Kegiatan ekowisata selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	
	Kelembagaan		75. Dibentuk Dewan Promosi Daerah 76. Dibentuk Batu Wisata Retour	
		PK11	Ekonomi	77. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal 78. Adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarkat
	Lingkungan		79. Pola wisata ramah lingkungan 80. Adanya rest area untuk pengunjung lokasi wisata	
	Sosial		81. Kegiatan ekowisata selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 82. Adaanya keterlibatan tokoh masyarakat 83. Pemahaman masyarakat area sekitar obyek wisata tentang kelestarian lingkungan	
	Kelembagaan		84. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat	

Keterangan:

PK1,PK2,PK3,.....PK11 = Pakar 1, Pakar 2, Pakar 3,....., Pakar 11

Tahap eksplorasi pendapat pakar menghasilkan 84 sub kriteria yang dapat dilihat pada **Tabel 4.12**. Selanjutnya, sub kriteria tersebut dilakukan proses analisis dengan cara mengelompokkan sub kriteria yang sama atau sub kriteria yang disebutkan lebih dari satu pakar, sehingga diperoleh jumlah sub kriteria yang lebih sedikit. Proses pengelompokkan sub kriteria yang sama atau sub kriteria yang disebutkan lebih dari satu pakar dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Proses pengelompokkan sub kriteria menghasilkan 41 sub kriteria yang dilihat pada **Tabel 4.13**.

Tabel 4. 13
Kriteria dan Sub Kriteria Berdasarkan Eksplorasi Pendapat Pakar

No.	Kriteria	Kriteria
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
		3. Promosi kawasan untuk meningkatkan jumlah kunjungan
		4. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)
		5. Masyarakat setempat dapat membuka lapangan pekerjaan baru di lokasi Wisata Kuliner Payung
		6. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah
		7. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata
2.	Lingkungan	8. Pengelolaan lingkungan oleh masyarakat
		9. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan
		10. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas
		11. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang
		12. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan
		13. Promosi budaya bersih
		14. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang
		15. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana
		16. Pembangunan yang memperhatikan risiko bencana yang terjadi pada daerah tersebut
		17. Pembuatan area yang digunakan untuk tempat Warung Kuliner
		18. Penataan kontruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang
		19. Pengembangan kawasan dengan limitasi fisik (kelerengan)
		20. Kerawanan kecelakaan lalu lintas
		3.
22. Penerapan tertib dan budaya antri		
23. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata		
24. Pemahaman masyarakat area sekitar objekwisata tentang kelestarian lingkungan		
25. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan		
26. Keterlibatan tokoh masyarakat		
27. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargon yang menarik)		
28. Peningkatan kualitas hidup masyarakat		
29. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)		
30. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha		
4.	Kelembagaan	
		32. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk
		33. Pembentukan lembaga pengelolaan bersama dengan prinsip adil dan transparan
		34. Keterlibatan masyarakat (PKK, Karangtaruna)
		35. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat
		36. Adanya upaya promosi wisata
		37. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung
		38. Pembentukan Batu Wisata Retour
		39. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat
		40. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang
		41. Kelembagaan yang mengatur tentang jasa ekowisata dan jasa lingkungan

Sub kriteria yang dihasilkan dari proses pengelompokan 84 sub kriteria digunakan sebagai pertanyaan pada kuesioner iterasi tahap pertama. Iterasi tersebut akan dilakukan berulang hingga tidak ada perubahan penilaian dari 11 pakar. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap iterasi.

1. Iterasi Tahap Pertama

Pertanyaan pada kuesioner iterasi tahap pertama menggunakan 41 sub kriteria yang diperoleh dari hasil eksplorasi pendapat pakar. Pertanyaan tersebut dinilai oleh 11 pakar yang sama dengan pakar pada tahap eksplorasi. Pengisian kuesioner tersebut dilakukan dengan cara, pakar memberikan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap 41 sub kriteria yang diajukan. Tujuan dari iterasi tahap pertama adalah mengetahui pendapat pakar terhadap sub kriteria yang diberikan oleh pakar yang lain serta mengetahui ada atau tidak pakar yang memberikan pendapat baru. Setelah diperoleh penilaian pakar, selanjutnya dilakukan analisis dengan menjumlahkan banyaknya pakar yang setuju terhadap masing-masing sub kriteria. Kemudian, dilakukan perhitungan prosentase untuk mengetahui sub kriteria yang mencapai level konsensus 60%. Hasil kuesioner dan perhitungan iterasi tahap pertama dapat dilihat pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4. 14
 Hasil Kuesioner Iterasi Tahap Pertama dan Perhitungan Level Konsensus

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	7	64%	
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		3. Promosi kawasan untuk meningkatkan jumlah kunjungan	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	36%	
		4. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	82%	
		5. Masyarakat setempat dapat membuka lapangan pekerjaan baru di lokasi Wisata Kuliner Payung	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6	55%
		6. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	9	82%
		7. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
2.	Lingkungan	8. Pengelolaan lingkungan oleh masyarakat	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	6	55%	
		9. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	91%	
		10. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		11. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		12. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		13. Promosi budaya bersih	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	5	45%	
		14. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	82%	

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
		15. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		16. Pembangunan yang memperhatikan risiko bencana yang terjadi pada daerah tersebut	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	6	55%	
		17. Pembuatan area yang digunakan untuk tempat Warung Kuliner	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8	73%	
		18. Penataan konstruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9	82%	
		19. Pengembangan kawasan dengan limitasi fisik (kelerengan)	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	6	55%	
		20. Kerawanan kecelakaan lalu lintas	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	9	82%	
3.	Sosial	21. Pengelolaan lingkungan hidup melalui aktivitas sosial yang positif	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	7	64%	
		22. Penerapan tertib dan budaya antri	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	82%	
		23. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		24. Pemahaman masyarakat area sekitar objekwisata tentang kelestarian lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		25. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		26. Keterlibatan tokoh masyarakat	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	45%	
		27. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
		masyarakat, melalui slogan atau jargon yang menarik)														
		28. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	91%	
		29. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		30. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10	91%	
4.	Kelembagaan	31. Mengembangkan pola kelembagaan lingkungan masyarakat setempat untuk pertanggung jawaban per-segmen	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	6	55%	
		32. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	9	82%	
		33. Pembentukan lembaga pengelolaan bersama dengan prinsip adil dan transparan	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		34. Keterlibatan masyarakat (PKK, Karangtaruna)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		35. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		36. Adanya upaya promosi wisata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		37. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	91%	
		38. Pembentukan Batu Wisata Retour	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5	45%	
		39. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	91%	

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
		keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat														
		40. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		41. Kelembagaan yang mengatur tentang jasa ekowisata dan jasa lingkungan	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	5	45%	

Keterangan =

1 = Setuju

0 = Tidak Setuju

PK1,PK2,PK3,.....PK11 = Pakar 1, Pakar 2, Pakar 3,....., Pakar 11

Hasil perhitungan level konsensus iterasi tahap pertama pada **Tabel 4.14** menunjukkan bahwa ada sub kriteria yang tidak mencapai level konsensus 60% sehingga sub kriteria tersebut akan dieliminasi. Sedangkan untuk sub kriteria yang mencapai level konsensus 60% digunakan pada iterasi tahap kedua sebagai pertanyaan yang akan diajukan kepada 11 pakar yang sama dengan iterasi tahap pertama. Sub kriteria yang mencapai level konsensus 60% dan digunakan pada iterasi tahap kedua dapat dilihat pada **Tabel 4.15**.

Tabel 4. 15
Hasil Iterasi Tahap Pertama

No.	Kriteria	Sub kriteria		
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat		
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal		
		3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)		
		4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah		
		5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata		
2.	Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan		
		7. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas		
		8. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang		
		9. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan		
		10. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang		
		11. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana		
		12. Pembuatan area yang digunakan untuk tempat Warung Kuliner		
		13. Penataan konstruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang		
		14. Kerawanan kecelakaan lalu lintas		
		3.	Sosial	15. Pengelolaan lingkungan hidup melalui aktivitas sosial yang positif
				16. Penerapan tertib dan budaya antri
				17. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata
				18. Pemahaman masyarakat area sekitar objek wisata tentang kelestarian lingkungan
				19. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan
20. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargon yang menarik)				
21. Peningkatan kualitas hidup masyarakat				
22. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)				
23. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha				
4.	Kelembagaan	24. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk		
		25. Pembentukan lembaga pengelolaan bersama dengan prinsip adil dan transparan		
		26. Keterlibatan masyarakat (PKK, Karangtaruna)		
		27. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat		
		28. Adanya upaya promosi wisata		
		29. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung		
		30. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat		
		31. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang		

Berdasarkan **Tabel 4.15** menunjukkan bahwa pada iterasi tahap pertama diperoleh 31 sub kriteria yang terdiri dari 5 sub kriteria ekonomi, 9 sub kriteria lingkungan, 9 sub kriteria sosial dan 8 sub kriteria kelembagaan. sub kriteria tersebut digunakan sebagai pertanyaan pada iterasi tahap kedua.

2. Iterasi Tahap Kedua

Iterasi tahap kedua bertujuan untuk mengetahui konsistensi pendapat pakar terhadap sub kriteria yang telah mereka pilih, melalui iterasi tahap kedua dapat dilihat pakar yang memberikan penilaian tidak sama dengan penilaiannya padaa tahap pertama. Sesuai dengan prinsip analisis *delphi* yaitu harus adanya identifikasi dan konfirmasi kepada responden hingga diperoleh level konsensus 60% tanpa adanya perubahan. Sub kriteria yang digunakan sebagai pertanyaan pada kuesioner iteraasi tahap kedua berjumlah 31 sub kriteria. Langkah pengisian kusioner yang dilakukan oleh 11 pakar sama dengan langkah pengisian pada kuesioner tahap pertama. Proses analisis yang dilakukan pada iterasi tahap kedua sama dengan iterasi tahap pertama yaitu dengan cara menjumlah dan melakukan perhitungan prosentase untuk mengetahui sub kriteria yang mencapai level konsensus 60%. Hasil kuesioner dan perhitungan level konsensus iterasi tahap kedua dapat dilihat pada **Tabel 4.16**.

Tabel 4. 16
 Hasil Kuesioner Iterasi Tahap Kedua dan Perhitungan Level Konsensus

No.	Kriteria	Sub kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11		
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	91%
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	82%
		5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	9	82%
2.	Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		7. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	91%
		8. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%
		9. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		10. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		11. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		12. Pembuatan rest area yang digunakan untuk tempat Warung Kuliner	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	5	45%
		13. Penataan kontruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%

No.	Kriteria	Sub kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
		bencana tanah longsor dan pohon tumbang														
3.	Sosial	14. Kerawanan kecelakaan lalu lintas	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	6	55%	
		15. Pengelolaan lingkungan hidup melalui aktivitas sosial yang positif	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	6	55%	
		16. Penerapan tertib dan budaya antri	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	5	45%
		17. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%
		18. Pemahaman masyarakat area sekitar objek wisata tentang kelestarian lingkungan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10	91%
		19. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		20. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargon yang menarik)	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	82%
		21. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
4.	Kelembagaan	22. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	91%	
		23. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	91%	
		24. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	82%	

No.	Kriteria	Sub kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
		pasokan minuman dan makanan bermerk														
	25.	Pembentukan lembaga pengelolaan bersama dengan prinsip adil dan transparan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	55%
	26.	Keterlibatan masyarakat (PKK, Karangtaruna)	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	55%
	27.	Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%
	28.	Adanya upaya promosi wisata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
	29.	Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
	30.	Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10	91%
	31.	Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10	91%

Keterangan =

1 = Setuju

0 = Tidak Setuju

PK1,PK2,PK3,.....PK11 = Pakar 1, Pakar 2, Pakar 3,....., Pakar 11

Setelah dilakukan perhitungan prosentase untuk mengetahui level konsensus dari masing-masing sub kriteria pada iterasi tahap kedua pada **Tabel 4.16**, maka dapat dilihat bahwa ada 6 sub kriteria yang tidak mencapai level konsensus 60% yang berarti bahwa terdapat perubahan dari iterasi tahap pertama ke iterasi tahap kedua. Sama seperti iterasi tahap pertama sub kriteria yang tidak mencapai level konsensus 60% akan dieliminasi sedangkan sub kriteria yang memperoleh level konsensus 60% akan digunakan sebagai pertanyaan pada iterasi tahap ketiga. Berikut sub kriteria yang mencapai level konsensus 60%.

Tabel 4. 17
Hasil Iterasi Tahap Kedua

No.	Kriteria	Sub kriteria
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
		3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)
		4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah
		5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata
2.	Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan
		7. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas
		8. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang
		9. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan
		10. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang
		11. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana
		12. Penataan konstruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang
		13. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata
3.	Sosial	14. Pemahaman masyarakat area sekitar objekwisata tentang kelestarian lingkungan
		15. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan
		16. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargonyang menarik)
		17. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
		18. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)
		19. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha
		20. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk
4.	Kelembagaan	21. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat
		22. Adanya upaya promosi wisata
		23. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung
		24. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat
		25. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang

Hasil dari iterasi tahap kedua adalah 25 sub kriteria yang dapat dilihat pada **Tabel 4.17**. Jumlah sub kriteria yang diperoleh dari iterasi tahap kedua lebih sedikit dari iterasi tahap pertama.

Sub kriteria tersebut digunakan sebagai pertanyaan pada kuesioner iterasi tahap ketiga dan akan dinilai oleh pakar yang sama dengan iterasi tahap pertama dan iterasi tahap kedua.

3. Iterasi Tahap Ketiga

Iterasi tahap ketiga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi pendapat pakar terhadap 25 sub kriteria yang diajukan. Langkah-langkah yang dilakukan pada iterasi tahap ketiga sama dengan iterasi tahap pertama dan tahap kedua yang membedakan adalah jumlah sub variabel yang digunakan sebagai pertanyaan. Proses analisis yang dilakukan juga sama dengan iterasi tahap pertama dan tahap kedua yaitu menghitung jumlah pakar yang setuju terhadap sub kriteria yang diajukan kemudian menghitung prosentase untuk mengetahui sub kriteria yang mencapai level konsensus 60% atau sub kriteria yang tidak mencapai level konsensus 60%. Hasil dari kuesioner tahap ketiga dan perhitungan prosentase dapat dilihat pada **Tabel 4.18**.

Tabel 4. 18
 Hasil Kuesioner Iterasi Tahap Ketiga dan Perhitungan Level Konsensus

No.	Kriteria	Sub kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11		
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	91%
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	82%
		5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	9	82%
2.	Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		7. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	6	55%
		8. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%
		9. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		10. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		11. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencanya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		12. Penataan kontruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	5	45%

No.	Kriteria	Sub kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
3.	Sosial	13. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		14. Pemahaman masyarakat area sekitar objekwisata tentang kelestarian lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
		15. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	82%
		16. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargon yang menarik)	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	5	45%
		17. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%
		18. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5	45%
4.	Kelembagaan	19. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		20. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	82%	
		21. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		22. Adanya upaya promosi wisata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	

No.	Kriteria	Sub kriteria	Pakar											Jumlah	Level Konsensus	
			PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	PK11			
	23.	Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	91%
	24.	Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1		6	55%
	25.	Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	100%

Keterangan =

1 = Setuju

0 = Tidak Setuju

PK1,PK2,PK3,.....PK11 = Pakar 1, Pakar 2, Pakar 3,....., Pakar 11

Berdasarkan **Tabel 4.16** dapat dilihat masih terdapat pakar yang berubah pendapat sehingga terdapat paramater yang harus dilakukan eliminasi. Terdapat lima paramater yang tidak mencapai level konsensus 60% sehingga kelima paramater tersebut akan dieliminasi. Setelah dilakukan proses eliminasi pada sub kriteria yang tidak mencapai level konsensus 60% maka diperoleh 20 sub kriteria. Berikut 20 sub kriteria yang diperoleh dari hasil iterasi tahap ketiga.

Tabel 4. 19
Hasil Iterasi Tahap Ketiga

No.	Kriteria	Sub kriteria
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
		3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)
		4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah
		5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata
2.	Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan
		7. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang
		8. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan
		9. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang
		10. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana
3.	Sosial	11. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata
		12. Pemahaman masyarakat area sekitar objek wisata tentang kelestarian lingkungan
		13. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan
		14. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
		15. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha
4.	Kelembagaan	16. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk
		17. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat
		18. Adanya upaya promosi wisata
		19. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung
		20. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang

Sub kriteria yang diperoleh dari hasil iterasi tahap ketiga pada **Tabel. 4.19** dikembalikan lagi kepada pakar yang sama dengan iterasi pada tahap pertama, kedua dan ketiga. Namun, hasil dari pengembalian 20 sub kriteria tersebut adalah tidak ada perubahan penilaian dari masing-masing pakar. Sehingga, pada penelitian pemilihan alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung banyaknya iterasi yang dilakukan pada analisis *delphi* adalah sebanyak tiga kali iterasi dengan 20 sub kriteria. Perbandingan hasil dan proesestase atau level konsensus yang diperoleh pada masing-masing iterasi dapat dilihat pada **Tabel 4.20**.

Tabel 4. 20
Perbandingan Hasil Tiga Tahap Iterasi Analisis Delphi

Kriteria / Kriteria	Hasil Iterasi Tahap Pertama	Prosentase (%)	Hasil Iterasi Tahap Kedua	Prosentase (%)	Hasil Iterasi Tahap Ketiga	Prosentase (%)
Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	64%	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	91%	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	91%
	2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	100%	2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	100%	2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	100%
	3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	82%	3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	100%	3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	100%
	4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	82%	4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	82%	4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	82%
	5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	100%	5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	82%	5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	82%
Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	91%	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	100%	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	100%
	7. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas	91%	7. Pemanfaatan sumberdaya kawasan pengembangan terbatas	91%	7. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	91%
	8. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	100%	8. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	91%	8. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	100%
	9. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	100%	9. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	100%	9. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	100%
	10. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	82%	10. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	100%	10. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana	100%
	11. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencanya	100%	11. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencanya	100%		
	12. Pembuatan area yang digunakan untuk tempat Warung Kuliner	73%	12. Penataan konstruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang	100%		

Kriteria / Kriteria	Hasil Iterasi Tahap Pertama	Prosentase (%)	Hasil Iterasi Tahap Kedua	Prosentase (%)	Hasil Iterasi Tahap Ketiga	Prosentase (%)
	13. Penataan kontruksi bangunan warung kuliner dengan memperhatikan aspek kerawanan bencana tanah longsor dan pohon tumbang	82%				
	14. Kerawanan kecelakaan lalu lintas	82%				
Sosial	15. Pengelolaan lingkungan hidup melalui aktivitas sosial yang positif	64%	13. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	91%	11. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	100%
	16. Penerapan tertib dan budaya antri	82%	14. Pemahaman masyarakat area sekitar objekwisata tentang kelestarian lingkungan	91%	12. Pemahaman masyarakat area sekitar objek wisata tentang kelestarian lingkungan	100%
	17. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	91%	15. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	100%	13. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	82%
	18. Pemahaman masyarakat area sekitar objekwisata tentang kelestarian lingkungan	91%	16. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargonyang menarik)	82%	14. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	91%
	19. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	100%	17. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	100%	15. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	100%
	20. Pengembangan upaya “promosi wisata” ramah lingkungan (terkait dengan perilaku dan kesadaran masyarakat, melalui slogan atau jargonyang menarik)	100%	18. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)	91%		
	21. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	91%	19. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	91%		

Kriteria / Kriteria	Hasil Iterasi Tahap Pertama	Prosentase (%)	Hasil Iterasi Tahap Kedua	Prosentase (%)	Hasil Iterasi Tahap Ketiga	Prosentase (%)
	22. Kegiatan kuliner ramah lingkungan (sebagai sarana promosi seperti penggunaan bahan dan kemasan yang dapat menjelaskan bahwa konservasi sangat diperlukan)	91%				
	23. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	91%				
Kelembagaan	24. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk	82%	20. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk	82%	16. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk	82%
	25. Pembentukan lembaga pengelolaan bersama dengan prinsip adil dan transparan	91%	21. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	91%	17. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	100%
	26. Keterlibatan masyarakat (PKK, Karangtaruna)	91%	22. Adanya upaya promosi wisata	100%	18. Adanya upaya promosi wisata	100%
	27. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	100%	23. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	100%	19. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	91%
	28. Adanya upaya promosi wisata	1000%	24. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat	91%	20. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	100%
	29. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	91%	25. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	91%		
	30. Perda yang mengatur kelembagaan dan regulasi keterlibatan lembaga yang ada di masyarakat	91%				
	31. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	100%				

Pada Tabel 4.18 dapat dilihat perbandingan hasil analisis dari masing-masing iterasi. Hasil dari ketiga iterasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan jumlah sub kriteria yang diperoleh. Selain perubahan jumlah sub kriteria dapat dilihat juga terdapat sub kriteria yang memiliki perbedaan level konsensus yang dicapai seperti pada sub kriteria pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat pada iterasi tahap pertama level konsensus yang dicapai adalah 64%, pada iterasi kedua dan ketiga level konsensus yang dicapai naik menjadi 91%. Hal tersebut berarti bahwa iterasi pada analisis *delphi* tidak dapat dilakukan satu kali iterasi saja sehingga harus dilakukan konfirmasi ulang kepada masing-masing pakar hingga tidak terdapat perubahan pendapat dan level konsensus. Selanjutnya untuk analisis *Multi Criteria Decision Making* adalah sub kriteria yang mencapai level konsensus lebih dari 60% yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 21
Sub Kriteria dengan Level Konsensus mencapai 60%

No.	Kriteria	Sub kriteria
1.	Ekonomi	1. Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat
		2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
		3. Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)
		4. Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah
		5. Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata
2.	Lingkungan	6. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan
		7. Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang
		8. Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan
		9. Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang
		10. Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana
3.	Sosial	11. Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata
		12. Pemahaman masyarakat area sekitar objek wisata tentang kelestarian lingkungan
		13. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan
		14. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
		15. Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha
4.	Kelembagaan	16. Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk
		17. Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat
		18. Adanya upaya promosi wisata
		19. Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung
		20. Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang

4.7 Formulasi Kebijakan dengan *Multi Criteria Decision Making*

Multi Criteria Decision Making pada penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung, hal ini disebabkan analisis MCDM merupakan teknik pengambilan keputusan *multi-kriteria* berbasis *non-parametrik*. Analisis MCDM adalah pemilihan alternatif terbaik dengan mempertimbangkan setiap kriteria dari alternatif yang diperoleh dari analisis konflik pengelolaan.

4.7.1 Perhitungan Pembobotan Kriteria Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Sebelum masuk kedalam tahap perhitungan MCDM, masing-masing kriteria dilakukan pembobotan. Proses pembobotan tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada 10 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung ditambah responden dari masyarakat Kelurahan Songgokerto dan pedagang Wisata Kuliner Payung. *Stakeholder* menilai kriteria yang memiliki kepentingan tertinggi dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. selanjutnya dari masing-masing kriteria dilakukan penjumlahan terhadap banyaknya *stakeholder* yang memilih kemudian dilakukan perhitungan prosentase. Berikut merupakan hasil pembobotan dari masing-masing kriteria.

Tabel 4. 22

Perhitungan Pembobotan Kriteria berdasarkan Pendapat Stakeholder

No.	Stakeholder	Kriteria			
		Lingkungan	Ekonomi	Kelembagaan	Sosial
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu	1	0	0	0
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu	1	0	0	0
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu	1	0	0	0
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu	1	0	0	0
5.	Perum Perhutani KPH Malang	1	0	0	0
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto (LPMK Songgokerto)	0	1	0	0
7.	Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung	0	1	0	0
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	0	0	1	0
9.	Masyarakat	0	0	0	1
10.	Pedagang Wisata Kuliner Payung	0	1	0	0
11.	Supplier barang (PT. Indofood Sukses Makmur)	0	1	0	0
12.	Kelurahan Songgokerto	0	0	1	0
Jumlah		5	4	2	1
Prosentase Bobot Nilai (%)		40	35	15	10

Keterangan:

1 : Dipilih

0 : Tidak Dipilih

Berdasarkan **Tabel 4.21** dapat dilihat kriteria yang dipilih oleh masing-masing *stakeholder* sehingga dapat dilakukan penilaian bobot dengan menggunakan perhitungan bobot. Berikut hasil perhitungan bobot untuk masing-masing kriteria.

Tabel 4. 23

Pembobotan Kriteria untuk Formulasi Kebijakan

No.	Kriteria	Bobot Nilai (%)
1.	Lingkungan	40
2.	Ekonomi	35
3.	Kelembagaan	15
4.	Sosial	10

Berdasarkan **Tabel 4.22** dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung kriteria yang perlu diperhatikan adalah kriteria lingkungan, kriteria ekonomi, kriteria kelembagaan dan kriteria sosial. Masing-masing kriteria yang digunakan telah dilakukan pembobotan berdasarkan keutamaan dari masing-masing kriteria. Kriteria lingkungan dari pengelolaan Wisata Kuliner Payung menjadi pertimbangan utama dengan bobot paling tinggi yaitu 40%, hal ini disebabkan oleh lokasi Wisata Kuliner Payung berada di wilayah hutan Perhutani KPH Malang yang memiliki fungsi sebagai hutan penyangga untuk permukiman yang berada di bawah lokasi Wisata Kuliner Payung. Selain itu, berdasarkan kajian pemetaan daerah rawan bencana lokasi Wisata Kuliner Payung memiliki potensi bencana tanah longsor yang tinggi. Kriteria ekonomi di Wisata Kuliner Payung memiliki bobot 35% dan menjadi kriteria kedua yang perlu diperhatikan karena Wisata Kuliner Payung merupakan salah satu destinasi pariwisata Kota Batu yang sudah lama berkembang dan menjadi salah satu *icon* pariwisata Kota Batu. Adanya Wisata Kuliner Payung menyebabkan adanya kegiatan perdagangan dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat meskipun tidak semua masyarakat tersebut berasal dari Kota Batu. Wisata Kuliner Payung jika dikelola dengan baik dan didukung oleh sistem kelembagaan yang baik serta mampu untuk tetap bersaing dengan wisata-wisata yang baru maka dapat menjadi salah satu sumber pemasukan daerah, sehingga kriteria ekonomi tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

Keberadaan Wisata Kuliner Payung yang sudah ada sejak awal berdirinya Kota Batu ternyata tidak didukung dengan sistem kelembagaan yang baik sehingga berpengaruh terhadap pembuatan proses pembuatan peraturan yang mengatur kebijakan untuk pengembangan Wisata Kuliner Payung. Berdasarkan hal tersebut maka kriteria kelembagaan

memiliki bobot 15% agar terdapat sistem kelembagaan dan peraturan yang dapat mengatur pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung melibatkan banyak *stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruhnya masing-masing, sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat mengurangi konflik kepentingan tersebut. Selain itu, peningkatan kualitas hidup pedagang di Wisata Kuliner Payung juga harus diperhatikan melalui program-program pemberdayaan masyarakat karena pada kondisi saat ini sebagian besar pedagang juga menggunakan lokasi berjualan mereka sebagai lokasi tempat tinggal.

4.7.2 Perhitungan Pembobotan Sub Kriteria dan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Setelah dilakukan pembobotan untuk masing-masing kriteria pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung, selanjutnya dilakukan pengukuran numerik terhadap masing-masing sub kriteria yang diperoleh dari hasil analisis *delphi* dengan menggunakan jumlah *stakeholder* yang sama yaitu 10 *stakeholder* ditambah responden dari masyarakat Kelurahan Songgokerto dan pedagang Wisata Kuliner Payung. Proses perhitungan numerik yang dilakukan pada masing-masing sub kriteria dilakukan sama dengan tahap perhitungan bobot pada tahap pembobotan kriteria yang dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Berikut merupakan hasil pengukuran numerik masing-masing sub kriteria pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

Tabel 4. 24

Pengukuran Numerik Sub Kriteria Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Kriteria	Sub Kriteria	Indeks (%)
Ekonomi	Pengelolaan sektor ekonomi berbasis jasa ekowisata	40
	Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal	25
	Memberikan value added bagi kawasan Payung (seperti : Landmark Songgoriti)	15
	Pengembangan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	10
	Adanya kontribusi dari pendapatan Wisata Kuliner Payung ke pendapatan daerah	10
		100
Lingkungan	Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan	35
	Kesiapsiagaan para pengelola wisata kuliner dan pengunjung wisata atas ancaman/potensi bencana	25
	Pengelolaan limbah terpadu oleh pedagang	15
	Pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan	15
	Tersedianya area lahan parkir (sarana dan prasarana) penunjang	10
	100	
Sosial	Pemahaman masyarakat area sekitar objek wisata tentang kelestarian lingkungan	35
	Adanya ketrampilan pedagang dalam melayani wisatawan dan ketrampilan berwirausaha	25
	Pedagang memiliki kesadaran alam dan lingkungan sekitar objek wisata	15
	Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan	15
	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	10
	100	

Kriteria	Sub Kriteria	Indeks (%)
Kelembagaan	Percepatan perijinan pembangunan Wisata Kuliner Payung	50
	Adanya ketegasan fungsi dari masing-masing stakeholder yang terlibat	15
	Adanya upaya promosi wisata	15
	Pengawasan terhadap harga jual dari masing-masing pedagang	10
	Kerjasama dengan pengusaha besar yang berhubungan dengan pasokan minuman dan makanan bermerk	10
		100

Hasil pengukuran numerik sub kriteria pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung pada **Tabel 4.23** tersebut digunakan sebagai kuesioner analisis *Multi Criteria Decision Making* dengan menggunakan metode TOPSIS. Pilihan alternatif kebijakan yang diperoleh pada tahap analisis konflik juga digunakan sebagai input dalam analisis *Multi Criteria Decision Making*. Berikut merupakan alternatif-alternatif kebijakan yang diformulasikan sebagai kebijakan dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

1. Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup dan wisata. Wisata Kuliner Payung yang berlokasi di dalam hutan penyangga Perhutani KPH Malang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup sehingga dibutuhkan kelembagaan yang mampu mengatur jasa ekowisata supaya kegiatan pariwisata yang ada di lokasi Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Penyusunan standarisasi operasional warung. Hal ini disebabkan kegiatan berdagang yang dilakukan oleh seluruh warung belum terorganisir dengan baik. Seperti tidak adanya penentuan daftar harga yang ada pada setiap warung sehingga di hari-hari tertentu misalnya saat liburan banyak pedagang yang menaikkan harga jauh diatas keuntungan normal mereka. Perilaku pedagang tersebut dapat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah pengunjung di Wisata Kuliner Payung.
3. Penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan. Pengelolaan wisata kuliner payung belum selesai proses perijinannya sehingga untuk mnyelesaikan konflik pengelolaan, dibutuhkan kebijakan berupa penyelesaian perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung.
4. Pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Pengelolaan tersebut sangat penting karena saat ini sudah banyak pedagang yang menggunakan lokasi berdagang mereka sebagai tempat tinggal

sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap sistem pembuangan air, pembuangan sampah dan limbah supaya tidak mencemari lingkungan.

5. Pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung. dengan adanya pengaturan wilayah tersebut diharapkan tidak ada lagi pedagang yang membuka warung baru yang berada di luar batas-batas legalitas wilayah yang sudah disepakati.
6. Pengelolaan Kawasan Wisata dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai faktor utama dari keberhasilan pembangunan daerah, dibutuhkan ketrampilan dari setiap masyarakat dan pedagang untuk dapat melayani pengunjung lokasi Wisata Kuliner Payung.
7. Penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung. Wisata kuliner payung sudah berdiri sejak awal mula berdirinya Kota Batu dengan ciri khas adanya bangunan yang menyerupai bentuk payung sehingga lokasi Wisata Kuliner tersebut terkenal dengan nama Wisata Kuliner Payung yang menawarkan pemandangan Kota Batu dan makanan yang khas berupa jagung bakar. Seiring berkembangnya jaman, ciri khas tersebut semakin hilang, bentuk bangunan yang dulunya terbuat dari kayu dan bambu sekarang sudah banyak yang terbuat dari semen. Selain itu, bangunan yang mirip Payung yang menjadi *landmark* Wisata Kuliner Payung juga sudah rusak sehingga membuat ciri khas Wisata Kuliner Payung juga ikut hilang.

Setelah ditetapkan pembobotan kriteria, pembobotan sub kriteria dan alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung, selanjutnya dilakukan proses analisis *Multi Criteria Decision Making* dengan menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS (*Technique for Order Performance by Similarit to Ideal Solution*) merupakan suatu teknik untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan *Multi Criteria Decision Making* karena alternatif-alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang atau terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak *Euclidean* (jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. TOPSIS akan memunculkan beberapa alternatif solusi berdasarkan hasil ranking kumulatif (Fauzi,2012)

4.7.3 Uji *Non Dominated Data Input*

Tujuan dari tahap uji *non dominated* adalah untuk mengetahui terdapat alternatif yang saling mendominasi atau tidak. Sebelum proses uji *non dominated* maka dilakukan proses input data dari 4 responden yang ditentukan berdasarkan analisis pemetaan *stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pemain (*player*). *Stakeholder* tersebut terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu dan paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung. Proses input data untuk analisis *Multi Criteria Decion Making* dapat dilihat pada **Lampiran 10** . Selanjutnya data tersebut dibuat rata-rata geometrik dari hasil kuesioner 4 responden berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Berikut merupakan hasil perhitungan rata-rata geometrik.

Tabel 4. 25

Hasil Perhitungan Rata-Rata Geometrik Data Analisis MCDM dengan Metode TOPSIS

Alternatif	MAX Lingkungan	MAX Ekonomi	MAX Kelembagaan	MAX Sosial
A1	25	40	37	10
A2	10	25	10	25
A3	35	40	15	19
A4	19	15	50	15
A5	35	32	37	15
A6	35	19	15	25
A7	35	15	20	25
Váhy	40,00000	35,00000	15,00000	10,00000

Berdasarkan **Tabel 4.24** dapat dilihat bahwa A1 adalah alternatif 1 yaitu pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup dan wisata, A2 adalah alternatif 2 yaitu penyusunan standarisasi operasional warung, A3 adalah alternatif 3 yaitu penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan, A4 adalah alternatif 4 yaitu pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah), A5 adalah alternatif 5 yaitu pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung, A6 adalah alternatif 6 yaitu pengelolaan Kawasan Wisata dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, A7 adalah alternatif 7 yaitu penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung. Sedangkan angka 40, 35, 15, dan 10 pada baris *Váhy* merupakan bobot dari masing-masing kriteria atau w_{ij} .

Setelah tahap input data selesai, selanjutnya dilakukan uji *non dominated* dengan menggunakan *non dominated testing* pada aplikasi *Sanna7* di program *Microsoft Excel*. Berikut hasil dari uji *dominated* terhadap alternatif-alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

Tabel 4. 26
Hasil Uji Non Dominated Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Alternatif	MAX	MAX	MAX	MAX	Test
	Lingkungan	Ekonomi	Kelembagaan	Sosial	
A1	25	40	37	10	Non-dominated
A2	10	25	10	25	Non-dominated
A3	35	40	15	19	Non-dominated
A4	19	15	50	15	Non-dominated
A5	35	32	37	15	Non-dominated
A6	35	19	15	25	Non-dominated
A7	35	15	20	25	Non-dominated
Váhy	40,00000	35,00000	15,00000	10,00000	

Berdasarkan **Tabel 4.25** dapat diketahui bahwa melalui uji *non dominated* semua alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung tidak ada yang saling mendominasi, sehingga seluruh alternatif tersebut dapat digunakan pada analisis *Multi Criteria Decision Making*.

4.7.4 Menyusun Matriks Keputusan Ternormalisasi dan Matriks Normalisasi

Terbobot

Pada tahap penyusunan matriks keputusan ternormalisasi, langkah yang dilakukan adalah menghitung matriks normalisasi sub kriteria terhadap alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Tahapan pertama adalah menghitung nilai total masing-masing sub kriteria. Nilai total masing-masing sub kriteria diperoleh dari nilai keseluruhan sub kriteria kemudian diakar.

Selanjutnya adalah melakukan normalisasi matriks awal. Mendapatkan nilai normalisasi (R_{ij}) dilakukan dengan cara membagi nilai matriks keputusan (X_{ij}) dengan nilai total matriks keputusan (X_{ij}). Nilai X_{ij} diperoleh dari **Tabel 4.26**. Berikut merupakan hasil rekap perhitungan R_{ij} yang ternormalisasi.

Tabel 4. 27
Matriks Normalisasi Subkriteria terhadap Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Alternatif	MAX	MAX	MAX	MAX
	Lingkungan	Ekonomi	Kelembagaan	Sosial
A1	0,32313	0,53168	0,47036	0,18946
A2	0,12925	0,33230	0,12712	0,47364
A3	0,45238	0,53168	0,19068	0,35997
A4	0,24558	0,19938	0,63562	0,28418

Alternatif	MAX	MAX	MAX	MAX
	Lingkungan	Ekonomi	Kelembagaan	Sosial
A5	0,45238	0,42535	0,47036	0,28418
A6	0,45238	0,25255	0,19068	0,47364
A7	0,45238	0,19938	0,25425	0,47364
Bobot	0,40000	0,35000	0,15000	0,10000

Setelah diperoleh matriks normalisasi subkriteria terhadap alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung, langkah selanjutnya adalah menghitung matriks normalisasi terbobot dengan cara mengalikan matriks normalisasi dengan nilai bobot kriteria pada **Tabel 4.27**. Berikut merupakan hasil perhitungan matriks normalisasi terbobot.

Tabel 4. 28

Matriks Normalisasi Terbobot Sub kriteria terhadap Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Alternatif	MAX	MAX	MAX	MAX
	Lingkungan	Ekonomi	Kelembagaan	Sosial
A1	0,12925	0,18609	0,07055	0,01895
A2	0,05170	0,11631	0,01907	0,04736
A3	0,18095	0,18609	0,02860	0,03600
A4	0,09823	0,06978	0,09534	0,02842
A5	0,18095	0,14887	0,07055	0,02842
A6	0,18095	0,08839	0,02860	0,04736
A7	0,18095	0,06978	0,03814	0,04736
Bobot	0,40000	0,35000	0,15000	0,10000

4.7.5 Menentukan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai hasil perhitungan dari seluruh nilai terbaik atau tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap alternatif, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk atau terendah yang dicapai untuk setiap alternatif. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Solusi ideal positif diperoleh dengan mencari nilai maksimum dari semua alternatif terhadap masing-masing kriteria pada matriks ternormalisasi terbobot. Sebaliknya solusi ideal negatif diperoleh dengan mencari nilai minimum dari semua alternatif terhadap masing-masing kriteria pada matriks ternormalisasi terbobot. Matriks ternormalisasi terbobot yang diperoleh digunakan dalam menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.

Tabel 4. 29
Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-)

	Kriteria			
	Lingkungan	Ekonomi	Kelembagaan	Sosial
A^+	0,18095	0,18609	0,09534	0,04736
A^-	0,05170	0,06978	0,01907	0,01895

Berdasarkan hasil perhitungan pada **Tabel 4.28** dapat dilihat bahwa pada kriteria lingkungan diperoleh nilai solusi ideal positif atau nilai maksimum sebesar 0,18095 dan solusi ideal negatif atau nilai minimum sebesar 0,05170. Kriteria ekonomi memiliki solusi ideal positif dengan nilai 0,18609 dan nilai solusi ideal negatif adalah 0,06978. Kriteria kelembagaan memiliki nilai solusi ideal positif 0,09534 dan nilai solusi ideal negatif 0,01907. Kriteria sosial dengan nilai solusi ideal positif 0,04736 dan nilai solusi negatif 0,01895. Hasil solusi ideal positif dan solusi ideal negatif berpengaruh pada perhitungan jarak dengan solusi ideal.

4.7.6 Menentukan Jarak dengan Solusi Ideal

Penentuan jarak dengan solusi ideal bertujuan untuk mendapatkan jarak pendekatan dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jarak solusi ideal positif (D^+) diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai kuadrat dari nilai matriks normalisasi terbobot sub kriteria dikurangi nilai dari solusi ideal positif (A^+) kemudian diakar. Kemudian untuk menentukan jarak solusi ideal negatif (D^-) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kuadrat dari nilai matriks normalisasi terbobot sub kriteria dikurangi nilai solusi ideal negatif (A^-) kemudian diakar. Berikut merupakan hasil dari perhitungan jarak solusi ideal positif (D^+) dan jarak solusi ideal negatif (D^-).

Tabel 4. 30
Jarak dari Matriks Ternormalisasi Terbobot Alternatif ke A^+ dan A^-

Alternatif	Jarak solusi ideal positif (D^+)	Jarak solusi ideal negatif (D^-)
A1	0,06399	0,14897
A2	0,16551	0,05452
A3	0,06770	0,17497
A4	0,14397	0,08985
A5	0,04857	0,16032
A6	0,11832	0,13398
A7	0,12961	0,13370

Jarak solusi ideal positif (D^+) dari masing-masing alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung dapat dilihat pada **Tabel 4.29** yang menunjukkan bahwa A5 atau alternatif 5 memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dalam menentukan alternatif yang diprioritaskan dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung sebesar 0,04857, diikuti oleh A3 atau alternatif 3 sebesar 0,06770, A1 atau alternatif 1 sebesar 0,06399, A7 atau alternatif 7 sebesar 0,12961, A6 atau alternatif 6 sebesar 0,11832, A4 atau alternatif 4 sebesar

0,14397 dan A2 atau alternatif 2 memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal positif yaitu sebesar 0,16551 dalam menentukan alternatif yang diprioritaskan dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

Selanjutnya, untuk jarak solusi ideal negatif (D^-) menunjukkan bahwa A3 atau alternatif 3 memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal negatif yaitu sebesar 0,17497, diikuti oleh A5 atau alternatif 5 sebesar 0,16032, A1 atau alternatif 1 sebesar 0,14897, A6 atau alternatif 6 sebesar 0,13398, A7 atau alternatif 7 sebesar 0,13370, A4 atau alternatif 4 sebesar 0,08985 dan A2 atau alternatif 2 memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal negatif yaitu sebesar 0,05452. Hasil perhitungan jarak solusi ideal positif dan jarak solusi ideal negatif digunakan sebagai input dalam perhitungan kedekatan relatif atau nilai preferensi.

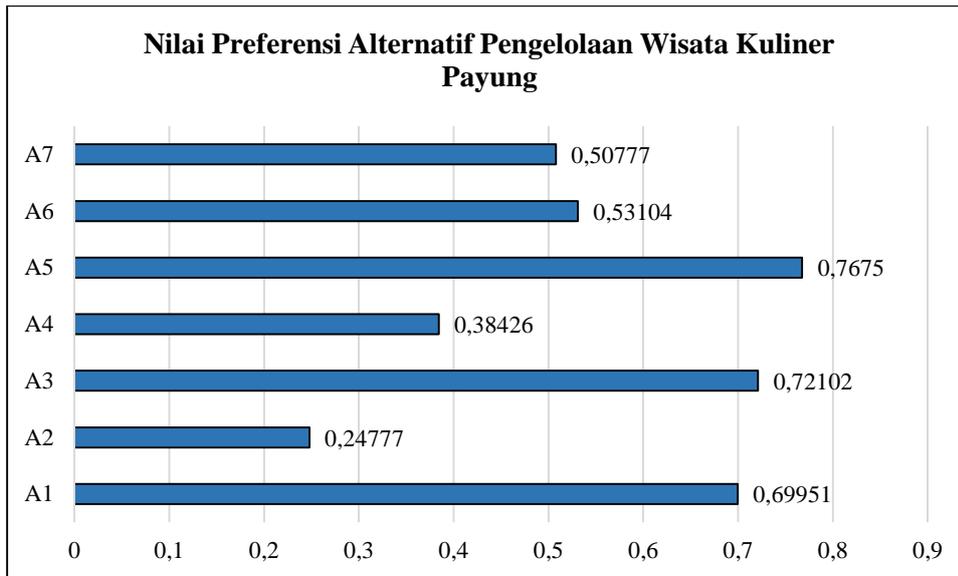
4.7.7 Menentukan Nilai Preferensi untuk Setiap Alternatif

Langkah terakhir dari analisis pemilihan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung adalah menghitung nilai preferensi. Menghitung nilai preferensi atau jarak kedekatan relatif dilakukan dengan cara membagi setiap jarak alternatif solusi ideal negatif dengan jumlah jarak alternatif solusi ideal positif dan jarak alternatif solusi ideal negatif. Berikut merupakan hasil perhitungan nilai preferensi atau jarak kedekatan relatif.

Tabel 4. 31
Hasil Perhitungan Nilai Preferensi dari Masing-Masing Alternatif

Alternatif	Jarak solusi ideal positif (D^+)	Jarak solusi ideal negatif (D^-)	Nilai Preferensi (C_i)
A1	0,06399	0,14897	0,69951
A2	0,16551	0,05452	0,24777
A3	0,06770	0,17497	0,72102
A4	0,14397	0,08985	0,38426
A5	0,04857	0,16032	0,76750
A6	0,11832	0,13398	0,53104
A7	0,12961	0,13370	0,50777

Berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi dari masing-masing alternatif maka dapat dibuat grafik sebagai berikut.



Gambar 4. 14 Grafik Nilai Preferensi Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Berdasarkan **Tabel 4.30** dapat dilihat bahwa alternatif A1 memperoleh nilai 0,69951, alternatif A2 memperoleh nilai 0,24777, alternatif A3 memperoleh nilai 0,72102, alternatif A4 memperoleh nilai 0,38426, alternatif A5 memperoleh nilai 0,76750, alternatif A6 memperoleh nilai 0,53104 dan alternatif A7 memperoleh nilai 0,50777. Sesuai dengan prinsip metode TOPSIS yaitu memilih alternatif yang mempunyai jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dengan solusi ideal negatif serta memiliki nilai kedekatan relatif yang paling tinggi. Sehingga dapat dilihat pada **Tabel 4.30** alternatif A5 yaitu pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung memiliki jarak dari solusi ideal positif yang paling dekat dibanding alternatif lainnya yaitu sebesar 0,04857 dan jarak dari solusi ideal negatif yang paling jauh kedua setelah alternatif A3 yaitu sebesar 0,16032. Sehingga memiliki perhitungan kedekatan relatif yang paling besar diantara yang lain yaitu sebesar 0,76750. Sebaliknya alternatif A2 yaitu penyusunan standarisasi operasional warung memiliki jarak dari solusi ideal positif yang paling jauh yaitu sebesar 0,16551 dan jarak dari solusi ideal negatif paling dekat yaitu sebesar 0,05452. Sehingga memiliki kedekatan relatif yang paling kecil yaitu sebesar 0,24777.

Berdasarkan hasil analisis *Multi Criteria Decision Making* menggunakan metode TOPSIS maka setiap alternatif dapat diurutkan sesuai dengan nilai preferensi yang paling besar ke nilai preferensi yang paling kecil.

Tabel 4. 32
Urutan Peringkat Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Peringkat	Alternatif	Nilai Preferensi
1	A5	0,76750
2	A3	0,72102
3	A1	0,69951
4	A6	0,53104
5	A7	0,50777
6	A4	0,38426
7	A2	0,24777

Berdasarkan hasil analisis *Multi Criteria Decision Making* maka diperoleh Formulasi kebijakan Pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu dengan urutan sebagai berikut.

1. Pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung
2. Penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan
3. Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup dan wisata
4. Pengelolaan kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung
6. Pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah)
7. Penyusunan standarisasi operasional warung

Setelah diperoleh formulasi kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung selanjutnya dilakukan perbandingan antara kebijakan pengelolaan yang telah dilakukan perhitungan dengan kondisi eksisting pada lokasi Wisata Kuliner Payung. Berikut merupakan perbandingan dari alternatif kebijakan dengan konflik pengelolaan.

Tabel 4. 33
Perbandingan Alternatif Pengelolaan dengan Kondisi Eksisting Wisata Kuliner Payung

Kode	Alternatif Pengelolaan	Konflik Pengelolaan
A5	Pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik penambahan lokasi pembangunan warung (K1,I2) 2. Konflik pemanfaatan fungsi hutan (K1,I3) 3. Konflik proses pembuatan peraturan (K1,I5) 4. Konflik sewa lokasi (K1,S1) 5. Konflik penentuan batas wilayah lokasi wisata kuliner payung (K1,M1) 6. Konflik pemanfaatan air bersih

Kode	Alternatif Pengelolaan	Konflik Pengelolaan
A3	Penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan	1. Konflik pembuatan ijin lingkungan oleh pedagang (K1,I4) 2. Konflik proses perijinan Wisata Kuliner Payung (K1, I6)
A1	Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup dan wisata	1. Konflik kelembagaan <i>stakeholder</i> (K1,I1) 2. Konflik pemberdayaan pedagang wisata kuliner payung (K2,I2)
A6	Pengelolaan Kawasan Wisata dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat	1. Konflik peluang pengembangan usaha (K2,I3)
A7	Penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung	1. Konflik ciri khas bentuk warung (K2,I1)
A4	Pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah)	1. Konflik pengelolaan air limbah dan sampah (K1, I7)
A2	Penyusunan standarisasi operasional warung	1. Konflik operasional warung (K2,S1)

Berdasarkan **Tabel 4.32** menunjukkan bahwa setiap alternatif pengelolaan dapat menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Alternatif prioritas 1 yaitu pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung, digunakan untuk menyelesaikan 6 konflik pengelolaan. Muatan yang diatur dalam peraturan pengelolaan Wisata Kuliner Payung disesuaikan dengan konflik yang terjadi, dengan muatan peraturan terdiri dari penentuan batas lokasi Wisata Kuliner Payung, ketentuan pemanfaatan fungsi hutan, prosedur dan ketentuan sewa lokasi, ketentuan penggunaan air bersih oleh pedagang serta peraturan lain yang mendukung kegiatan Wisata Kuliner Payung. Adanya peraturan terkait pengelolaan Wisata Kuliner Payung diperlukan karena hutan BKPH Pujon adalah hutan peyangga yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan melalui satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk sehingga dapat mengatur tata air, mencegah tanah longsor, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Proses penentuan pembuatan peraturan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat langsung pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Perum Perhutani KPH Malang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Songgokerto, Kelurahan Songgokerto, paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung, pedagang Wisata Kuliner Payung dan masyarakat Kelurahan Songgokerto.

Alternatif prioritas 2 yaitu penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan, digunakan untuk menyelesaikan 2 konflik yang terkait dengan perijinan pendirian bangunan dan ijin lingkungan oleh pedagang. Penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung diperlukan sebagai bukti pengesahan yang diberikan dan disahkan oleh pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Malang. Selain itu adanya surat ijin usaha penting dimiliki oleh pedagang Wisata Kuliner Payung untuk memperlancar perdagangan dan kegiatan berwisata sehingga dapat menghindari masalah dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang kemungkinan muncul sewaktu-waktu dikemudian hari. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan yang menyebutkan bahwa persyaratan bangunan yaitu (1) setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, (3) persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan ijin mendirikan bangunan gedung, (4) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. Sedangkan peraturan terkait perijinan dampak lingkungan meliputi, (1) penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, (2) setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Alternatif prioritas 3 yaitu pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup. Alternatif ini digunakan untuk menyelesaikan 2 konflik yang berkaitan dengan konflik kelembagaan dan konflik pemberdayaan pedagang. Pembentukan kelembagaan ini melibatkan Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, Pemerintah Kelurahan Songgokerto, dan Perum Perhutani KPH Malang. Kemudian dari pihak masyarakat yang terdiri dari Paguyuban pedagang jagung bakar Wisata Kuliner Payung.

selain itu kelembagaan juga didukung oleh pihak swasta yaitu dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto dan PT. Indofood Sukses Makmur. Pembentukan kelembagaan dibuat secara resmi dengan dikeluarkannya SK dari Pemerintah Kota Batu seperti SK Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan struktur kelembagaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten. Tujuan pembentukan kelembagaan tersebut adalah untuk mengembangkan pola kemitraan sesuai dengan fungsi dan tupoksi masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Pola kemitraan yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung seperti kemitraan dalam sewa lahan yang dilakukan oleh pedagang kepada Perum Perhutani KPH Malang sebagai pemilik kawasan hutan BKPH Pujon dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, kemitraan antara pedagang dengan swasta yaitu PT. Indofood Sukses Makmur dalam penyediaan stok barang yang dijual, kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Malang dalam mendukung kegiatan wisata dan mengelola kawasan hutan yang digunakan sebagai lokasi wisata sehingga dampak negatif dari adanya Wisata Kuliner Payung dapat diminimalisir.

Alternatif prioritas 4 yaitu pengelolaan kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Alternatif ini digunakan untuk menyelesaikan konflik peluang pengembangan usaha dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru di lokasi Wisata Kuliner Payung selain usaha berdagang. Lapangan pekerjaan tersebut berupa pembangunan spot-spot foto untuk menarik wisatawan berkunjung ke lokasi Wisata Kuliner Payung yang dikelola oleh masyarakat Kelurahan Songgokerto. Perlunya melibatkan masyarakat Kelurahan Songgokerto secara langsung dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung karena masyarakat sangat menentukan pengembangan dan pengelolaan lokasi wisata dapat berjalan dengan baik. Melalui pemberian peran dan tanggung jawab kepada masyarakat berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan kegiatan wisata akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab tersebut diberikan kepada masyarakat maka semakin besar kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan kawasan wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan arahan serta pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Songgokerto kepada masyarakat Kelurahan Songgokerto. Arahan dan pendampingan yang diberikan terkait cara mengelola kegiatan wisata yang baik, cara memberikan pelayanan kepada wisatawan serta cara menjaga keanekaragaman hayati yang ada di hutan KPH Pujon.

Alternatif prioritas 5 yaitu penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung. Proses pelaksanaan alternatif tersebut dengan membangun kembali bangunan dengan desain mirip payung yang merupakan ciri khas Wisata Kuliner Payung. Selain itu, konsep bangunan warung-warung yang ada di Wisata Kuliner Payung di desain ulang agar pengunjung dapat melihat pemandangan Kota Batu yang ada di belakang Wisata Kuliner Payung.

Alternatif prioritas 6 yaitu pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Alternatif tersebut digunakan untuk menyelesaikan konflik terkait pengelolaan sistem persampahan dan pengelolaan air limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan berdagang di Wisata Kuliner Payung. Alternatif prioritas 6 dilakukan dengan membangun TPS sehingga sampah yang dihasilkan oleh setiap warung dapat dikelola secara komunal serta para pedagang tidak membuang sampah ke wilayah hutan yang terdapat di belakang lokasi berdagang. Sedangkan untuk pengelolaan air limbah dilakukan dengan membangun sistem pembuangan air limbah untuk setiap warung yang memberikan fasilitas MCK. Pembangunan sistem pembuangan air limbah dapat dibangun secara komunal untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Pengelolaan terkait kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan untuk menjaga lokasi wisata tetap nyaman baik untuk wisatawan ataupun pedagang di Wisata Kuliner Payung.

Alternatif prioritas 7 yaitu penyusunan standarisasi operasional warung. Penyusunan standarisasi operasional warung terdiri dari penentuan harga jual barang, penentuan waktu operasional, penentuan fasilitas yang diberikan untuk pengunjung dan penentuan iuran pedagang untuk operasional Wisata Kuliner Payung secara komunal. Standarisasi operasional warung sangat dibutuhkan untuk menjaga kepuasan konsumen atau wisatawan dengan harga yang diberikan oleh pedagang. Proses pembuatan standarisasi operasional warung dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan paguyuban dengan pedagang dan didampingi oleh Pemerintah Kota Batu dan LPM Kelurahan Songgokerto.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”